

STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT 2004
Central Government Financial Statistics 2004

ISBN.

No. Publikasi / Publication Number : 05310.

Katalog BPS / BPS Catalogue : 7404.

Ukuran Buku / Book Size : 21 Cm X 28 Cm

Jumlah Halaman / Number of Pages : 62 halaman / pages

Naskah / Manuscript :

Subdirektorat Statistik Keuangan

Financial Statistics Subdirectorate

Gambar Kulit / Cover design :

Subdirektorat Publikasi Statistik

Statistical Publication Subdirectorate

Diterbitkan oleh / Published by :

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

BPS – Statistics Indonesia

Dicetak oleh / Printed by :

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2004 adalah publikasi yang diterbitkan BPS untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis data yang berkaitan dengan keuangan pemerintah. Publikasi ini merupakan lanjutan dari publikasi sejenis yang pernah diterbitkan BPS, yang memuat data anggaran pendapatan dan belanja negara, realisasi penerimaan dan pengeluaran rutin serta pengeluaran pembangunan. Data dalam publikasi ini bersumber dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Desa.

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerjasama dari berbagai instansi pemerintah. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan penerbitan yang akan datang.

Jakarta, Agustus 2006

Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Rusman Heriawan

NIP. 340003999

Daftar Isi / Contents

	Halaman Page
Kata Pengantar/Preface	iii
Daftar Isi/Contents	iv
Ulasan Ringkas/Explanatory Notes	vii
Daftar Grafik/List of Graph	
1. Anggaran Pendapatan Negara/The Budgeted Government Revenues	xxii i
2. Anggaran Belanja Negara/The Budgeted Government Expenditures	xxiv
3. Anggaran Dana Perimbangan/Balanced Budget	xxv
 Tabel/Table	
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/State Budget 2002-2005	3
2. Anggaran Pendapatan Negara/The Budgeted Government Revenues 2003-2005	4
3. Realisasi Pendapatan Negara/Actual Government Revenues 2002-2004	5
4. Anggaran Belanja Negara/The Budgeted Government Expenditures 2003-2005	6
5. Realisasi Belanja Negara/Actual Government Expenditure 2002-2004	7
6. Anggaran Penerimaan Pajak/The Budgeted Tax Revenues 2003-2005	8
7. Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak/The Budgeted Non Tax Revenues 2003-2005	9
8. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri/Actual Domestic Revenues 1989/1990-2005	10
9. Realisasi Penerimaan Perpajakan/Actual Tax Revenues 1989/1990-2005	11
10. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Klasifikasi Ekonomi/The Budget Central Government Expenditures by Economic Classification 2004-2005	12
11. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi/The Budget Central Government Expenditures by Functions 2005	13
12. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/The Budget Central Government Expenditures by Organization 2005	14
13. Pembiayaan Anggaran/Budget Financing 2004-2005	17
14. Anggaran Belanja Pembangunan Termasuk Bantuan Proyek/The Budgeted Development Expenditures Including Project Aid 2000-2005	18
15. Ringkasan Anggaran dan Realisasi/The Budget and Realization 2002-2004	20
16. Posisi Portofolio Obligasi Pemerintah/Outstanding of Government Bonds Portfolio 1999-2004	21
17. Uang Beredar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi/ Money Supply and Its Determinants 1999-2004	23
18. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Propinsi/Actual Receipts and Expenditures for Province Regions 2002-2004	25
19. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten/Kota/Actual Receipt and Expenditures for Regency/Municipality Regions 2003-2004	28
20. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Desa Urban/Actual Receipt and Expenditures of Urban Village Government 2001-2003	31
21. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Desa Rural/Actual Receipt and Expenditures of Rural Village Government 2001-2003	34

ULASAN RINGKAS

I. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan penjabaran rencana kerja para penyelenggara negara untuk kurun waktu satu tahun. Dalam bentuk yang paling ringkas, APBN dituangkan ke dalam suatu format yang memuat pengelompokan jenis transaksi berkaitan dengan rencana kegiatan penyelenggaraan negara menurut pengaruhnya terhadap posisi keuangan negara selama jangka waktu satu tahun. APBN Tahun Anggaran 2004 disusun di tengah-tengah munculnya rasa optimisme yang tinggi terhadap prospek dan upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, seiring dengan mulai tumbuhnya kembali kepercayaan masyarakat dan para pelaku pasar, baik di dalam maupun di luar negeri terhadap terbentuknya pemerintahan baru yang dipilih melalui proses yang demokratis dan konstitusional, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir, serta berbagai kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2005. Momentum yang cukup kondusif tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mempercepat proses penyelamatan dari krisis multi-dimensional yang berkepanjangan.

Kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBN tahun 2005. APBN 2005 juga harus mampu menanggung beban pembiayaan defisit anggaran. Defisit anggaran yang direncanakan harus didasarkan lebih pada kemampuan pembiayaan dalam negeri, sementara pembiayaan luar negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap. APBN 2005 merupakan APBN pertama yang disusun berdasarkan mekanisme pembahasan dan format baru sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Karena itu penyusunan APBN 2005 dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2005 sebagaimana telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2005.

Kebijakan keuangan negara pada tahun 2005 diarahkan tidak hanya terfokus pada upaya untuk mengendalikan defisit anggaran semata, melainkan bergeser kepada masalah pemenuhan kebutuhan pembiayaan dibanding dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang terbatas (*financing gap*). Hal ini disebabkan terutama oleh membengkaknya beban kewajiban pembayaran pokok utang, baik utang dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi tersebut mengisyaratkan perlunya strategis kebijakan fiskal tahun 2005 tetap dijaga agar konsisten dalam mendorong upaya peningkatan penerimaan negara, mengendalikan dan mengefisienkan belanja negara, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan. Strategi ini memerlukan langkah-langkah pembaharuan (*reformasi*) yang berkelanjutan pada berbagai jenis instrumen fiskal, yang meliputi: (i) bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, (ii) penganggaran belanja negara, (iii) pengelolaan utang dan optimalisasi pembiayaan anggaran, serta (iv) penataan kelembagaan keuangan negara.

Meskipun defisit anggaran dalam APBN 2005 lebih rendah dari defisit anggaran dalam APBN-P 2004, akan tetapi tantangan yang dihadapi di sisi pembiayaan tidaklah semakin ringan. Pembiayaan dimaksud diperlukan selain untuk menutupi defisit APBN, juga diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri dan utang luar negeri yang akan jatuh tempo dalam tahun 2005. Kewajiban tersebut harus dipenuhi seluruhnya dan tepat waktu, oleh karena sebagai konsekuensi dari diakhirinya program kerjasama dengan IMF, sejak tahun 2004 Pemerintah tidak lagi dapat memanfaatkan fasilitas penjadwalan ulang (*rescheduling*) utang luar negeri melalui forum Paris Club (PC).

Dalam rangka menutup defisit anggaran, akan dilakukan langkah-langkah mobilisasi sumber-sumber pembiayaan melalui: (i) penggunaan sebagian dana simpanan pemerintah di Bank Indonesia; (ii) penjualan aset eks BPPN yang sekarang dikelola oleh PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset) dan melanjutkan kebijakan privatisasi BUMN secara optimal; (iii) penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dengan mempertimbangkan program moneter dan pengelolaan utang secara terpadu; (iv) penarikan pinjaman luar negeri, baik pinjaman proyek maupun pinjaman program secara selektif, seraya memperbaiki ketentuan dan persyaratan pinjaman, serta mengupayakan konversi utang.

Berdasarkan kondisi objektif dan langkah-langkah kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dan berdasarkan asumsi besaran variabel-variabel ekonomi makro yang diperkirakan akan dicapai dalam tahun 2005, pendapatan negara dan hibah dalam APBN 2005 ditetapkan sebesar Rp 380,4 triliun atau 17,4% terhadap PDB. Jumlah ini berarti menurun jika dibandingkan dengan APBN-Perubahan (APBN-P) 2004 yaitu sebesar Rp 403,8 triliun. Begitu juga anggaran belanja negara yang mengalami penurunan dari Rp 430,0 triliun pada APBN-P 2004 menjadi Rp 397,8 triliun pada APBN 2005. Namun defisit anggaran pada APBN 2005 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan APBN-P 2004 yaitu menjadi Rp 17,4 triliun pada APBN 2005 dari Rp 26,3 triliun pada APBN-P 2004. Secara garis besar, rencana APBN 2005 dapat dilihat pada **Tabel A**.

Dalam satu tahun terakhir, telah dimulai langkah reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara, dengan diberlakukannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara, yaitu (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Paket perundang-undangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan reformasi pengelolaan keuangan negara merupakan dasar hukum yang kuat di bidang keuangan negara untuk lebih mandiri, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting, sebagai upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran secara sungguh-sungguh, guna meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam tahun 2005 telah dilaksanakan reformasi belanja negara dengan mengubah format anggaran belanja negara menjadi bersifat terpadu (*unified budget*), yaitu menyatukan anggaran belanja rutin dengan anggaran belanja pembangunan. Bersamaan dengan itu, dilakukan juga reklasifikasi belanja negara, khususnya belanja negara untuk pemerintah pusat. Anggaran belanja negara dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu (1) *belanja Pemerintah Pusat*, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain; (2) *belanja untuk Daerah*, yang terdiri dari dana perimbangan, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian.

Tabel : A
Table

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
State Budget
2004 - 2005
(Triliun Rupiah/Bilion Rupiahs)

Perincian/Description (1)	2004		2005	
	APBN-P (2)	% thd PDB (3)	APBN (4)	% thd PDB (5)
Pendapatan dan Hibah / Revenue and Grants	403,8	20,3	380,4	17,4
Penerimaan Dalam Negeri / Domestic Revenue	403,0	20,3	379,6	17,3
Penerimaan Pajak / Tax Revenue	279,2	14,0	297,8	13,6
Penerimaan Bukan Pajak / Non Tax Revenue	123,8	6,2	81,8	3,7
Hibah / Grants	0,7	0,0	0,8	0,0
Pengeluaran / Expenditures	430,0	21,6	397,8	18,2
Pengeluaran Pemerintah Pusat / Central Government Expenditures	300,0	15,1	266,2	12,2
Pengeluaran Untuk Daerah / Expenditure for Regions	130,0	6,5	131,5	6,0
Surplus atau Defisit Anggaran / Overall Balance	-26,3	-1,3	-17,4	-0,8
Pembiayaan Bersih / Financing Net	26,3	1,3	17,4	0,8
Pembiayaan Dalam Negeri / Domestic Financing	50,1	2,5	37,6	1,7
Pembiayaan Luar Negeri / Foreign Financing	-23,8	-1,2	-20,2	-0,9

Sumber/Source : Departemen Keuangan / Ministry of Finance

Catatan/Note : Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan/
Difference of one digit on the last figures are caused by rounded off

Asumsi - asumsi Makro dalam Penyusunan APBN 2005

	<u>Th 2004</u>	<u>Th 2005</u>
1 Pertumbuhan ekonomi (persen)	4,8	5,4
2 Inflasi (persen)	6,5	5,5
3 Nilai tukar rupiah per US (Rp)	8.600,0	8.600,0
4 Suku bunga SBI 3 bulan (persen)	8,5	6,5
5 Harga minyak internasional (US\$/barel)	22,0	24,0
6 Produksi minyak Indonesia (juta barel/hari)	1,2	1,1

II. Pendapatan Negara dan Hibah

Dengan semakin berat dan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kebijakan fiskal, maka APBN 2005 disusun sedemikian rupa, sehingga dapat mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan untuk menjamin terjaganya konsistensi arah dan kesinambungan proses konsolidasi fiskal. Tantangan yang dihadapi selain upaya untuk mengendalikan defisit anggaran, juga mencari cara dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran tersebut. Dalam tahun 2005, pendapatan negara dan hibah ditetapkan sebesar Rp 380,4 triliun atau 17,4% terhadap PDB, yang berarti mengalami penurunan Rp 23,4 triliun atau 5,8% jika dibandingkan dengan APBN-P 2004 yang mencapai Rp 403,8 triliun. Pendapatan negara dan hibah tersebut direncanakan bersumber dari penerimaan dalam negeri yaitu sebesar Rp 379,6 triliun, dimana 78,3% berupa penerimaan perpajakan dan sisanya 21,5% berupa penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan hibah direncanakan sebesar Rp 0,8 triliun. Kontribusi penerimaan sektor perpajakan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah tetap konsisten untuk terus menggali sumber-sumber pendanaan dari dalam negeri dalam rangka mewujudkan kemandirian APBN.

II.1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 297,8 triliun atau 13,6% terhadap PDB. Kenaikan nominal sebesar Rp 18,6 triliun dari APBN-P 2004 tersebut dipengaruhi oleh upaya Pemerintah melakukan penyempurnaan kebijakan perpajakan, dan juga melanjutkan langkah-langkah perbaikan dalam bidang administrasi perpajakan (*tax administration reform*) yang telah dimulai sejak tahun 2001.

Komponen utama dari penerimaan perpajakan adalah penerimaan pajak penghasilan (PPh), dimana dalam tahun 2005 direncanakan sebesar Rp 142,2 triliun atau 6,5% terhadap PDB. Hal ini berarti mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan APBN-P 2004 yaitu sebesar Rp 135,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 90,4% atau Rp 128,6 triliun merupakan penerimaan PPh non migas, dan sekitar 9,6% merupakan penerimaan PPh migas.

Meningkatnya penerimaan PPh non migas ini didasarkan atas perkiraan terjadinya potensi kehilangan (*potential loss*) penerimaan PPh, berkaitan dengan adanya rencana kebijakan penyesuaian PTKP PPh orang pribadi, dan penyesuaian tarif PPh badan sebagaimana diusulkan dalam RUU Perubahan Undang-undang tentang PPh. Sementara itu, sasaran penerimaan PPh migas dalam tahun 2005 ditetapkan Rp 13,6 triliun atau 0,6% terhadap PDB. Jumlah tersebut lebih rendah Rp 9,5 triliun dibandingkan dengan penerimaan PPh migas dalam tahun 2004-P yang mencapai Rp 23,1 triliun atau 1,2% terhadap PDB. Lebih rendahnya sasaran penerimaan PPh migas tersebut disebabkan oleh lebih rendahnya asumsi harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2005.

Selanjutnya, penerimaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn dan PPnBM) dalam tahun 2005 ditetapkan Rp 98,8 triliun atau 4,5% terhadap PDB. Jumlah ini berarti mengalami peningkatan Rp 11,3 triliun dibandingkan APBN-P 2004. Peningkatan tersebut didasarkan atas kalkulasi perkiraan terjadinya peningkatan nilai transaksi ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2005, dan perkiraan terjadinya tambahan penerimaan (*potential gain*) Ppn dari kebijakan perluasan basis pajak sebagaimana diusulkan dalam amandemen Undang-undang Ppn dan PpnBM.

Dengan berdasarkan perkiraan kondisi perekonomian yang terus membaik, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada sektor konstruksi dan transaksi properti, serta berbagai upaya yang akan dilakukan seperti program ekstensifikasi melalui *digital mapping*, dan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan dalam tahun 2005, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan Rp 13,5 triliun atau 0,6% terhadap PDB. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan PBB Rp 10,3 triliun atau 0,5% terhadap PDB dan BPHTB Rp 3,2 triliun atau 0,1% terhadap PDB. Jika dibandingkan dengan APBN-P 2004, maka penerimaan PBB dan BPHTB tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar Rp 0,1 triliun.

Sasaran penerimaan cukai dalam APBN 2005 ditetapkan Rp 28,9 triliun atau 1,3% terhadap PDB. Jumlah ini berarti meningkat Rp 0,5 triliun dari APBN-P 2004 yang mencapai Rp 28,4 triliun. Peningkatan ini didorong oleh naiknya produksi barang kena cukai sejalan dengan perkembangan ekonomi. Sedangkan pajak dalam negeri lainnya

ditetapkan sebesar Rp 2,0 triliun atau 0,1% terhadap PDB. Jika dibandingkan dengan APBN-P 2004 berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 0,2 triliun. Peningkatan tersebut bersumber dari perkiraan meningkatnya jumlah dan nilai transaksi yang membutuhkan bea materai.

Penerimaan bea masuk dan pajak/pungutan ekspor merupakan bagian dari pajak perdagangan internasional, dimana kedua jenis penerimaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan impor dan ekspor, besarnya tarif dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (dolar Amerika Serikat). Di sisi lain, nilai impor dan ekspor berhubungan erat dengan perkembangan kondisi perekonomian, kebijakan kepabean seperti fasilitas pembebasan bea masuk, dan kebijakan di bidang ekspor. Berdasarkan berbagai hal yang mempengaruhi tersebut, penerimaan pajak perdagangan internasional dalam APBN 2005 ditetapkan Rp 12,4 triliun atau 0,6% terhadap PDB, yang berarti naik Rp 0,2 triliun dibanding APBN-P 2004 yang mencapai Rp 12,2 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan bea masuk ditetapkan Rp 12,0 triliun atau 0,5% terhadap PDB, berarti Rp 0,2 triliun lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan pada APBN-P 2004. Sedangkan penerimaan pajak/pungutan ekspor ditetapkan Rp 0,3 triliun atau 0,02% terhadap PDB, yang berarti naik Rp 8,3 milyar dibandingkan dengan APBN-P 2004.

II.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam rangka mendukung dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal, maka kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhadap pendapatan negara akan senantiasa diupayakan lebih meningkat dari waktu ke waktu. Dalam tahun 2004 akan dilanjutkan langkah-langkah untuk memantapkan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Langkah-langkah tersebut meliputi antara lain (i) optimalisasi dan intensifikasi PNPB yang bersumber dari SDA; (ii) penanggulangan pertambangan tanpa izin (Peti); (iii) optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dengan berwawasan hutan lestari; (iv) pengelolaan potensi sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan lestari; (v) peningkatan kinerja dan kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui peningkatan intensitas penerapan *good corporate governance*;

Tabel : B
Table

Pendapatan Negara dan Hibah
Government Revenues and Grants
2004 - 2005
(Triliun Rupiah/Billion Rupiahs)

Sumber Penerimaan / <i>Source of Revenues</i>	2004		2005	
	APBN-P	% thd PDB	APBN	% thd PDB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerimaan Dalam Negeri / <i>Domestic Revenue</i>	403,0	20,3	379,6	17,3
Penerimaan Pajak / <i>Tax Revenue</i>	279,2	14,0	297,8	13,6
Pajak Dalam Negeri / <i>Domestic Tax</i>	267,0	13,4	285,5	13,0
Pajak Penghasilan / <i>Income Tax</i>	135,9	6,8	142,2	6,5
Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah / <i>Value Added Taxes on Goods & Services, and Tax on Sale of Luxury Goods</i>	87,5	4,4	98,8	4,5
Pajak Bumi & Bangunan / <i>Land and Building Tax</i>	10,2	0,5	10,3	0,5
Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan / <i>Tax of Rights in Land and Building</i>	3,2	0,2	3,2	0,1
Cukai / <i>Excise Duties</i>	28,4	1,4	28,9	1,3
Pajak Lainnya / <i>Other Taxes</i>	1,8	0,1	2,0	0,1
Pajak Perdagangan Internasional / <i>International Trade Taxes</i>	12,2	0,6	12,4	0,6
Bea Masuk / <i>Import Duties</i>	11,8	0,6	12,0	0,5
Pajak Ekspor / <i>Export Tax</i>	0,3	0,0	0,3	0,0
Penerimaan Bukan Pajak / <i>Non Tax Revenue</i>	123,8	6,2	81,8	3,7
Penerimaan Sumber Daya Alam / <i>Natural Resources Revenue</i>	92,4	4,6	50,9	2,3
Bagian laba BUMN / <i>Profit Transfer from SOE's</i>	9,1	0,5	10,6	0,5
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya / <i>Other Non Tax Revenue</i>	22,3	1,1	20,3	0,9
Hibah / <i>Grants</i>	0,7	0,0	0,8	0,0
Jumlah / <i>Total</i>	403,8	20,3	380,4	17,4

Sumber/Source : Departemen Keuangan / *Ministry of Finance*

Catatan/Note : Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan/
Difference of one digit on the last figures are caused by rounded off

serta (vi) evaluasi dan peninjauan kembali tarip PNPB yang dikelola di berbagai departemen/lembaga pemerintah non departemen (LPND).

Mengingat sebagian besar PNBPN tersebut sampai saat ini masih ditopang oleh penerimaan SDA Migas, maka besaran PNBPN disamping ditentukan oleh upaya dan kebijakan pemerintah, juga dipengaruhi oleh perkembangan harga dan tingkat produksi minyak mentah. Dengan mempertimbangkan kedua faktor tersebut, maka PNBPN dalam APBN 2005 ditetapkan Rp 81,8 triliun atau 3,7% terhadap PDB yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp 42,0 triliun jika dibandingkan dengan APBN-P 2004 yang mencapai Rp 123,8 triliun atau 6,2% terhadap PDB.

Dengan didasarkan pada asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price-ICP*) di pasar Internasional sebesar US\$ 24,0 per barel, tingkat produksi minyak mentah 1,125 juta barel per hari, dan rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp 8.600,- per dolar Amerika, maka penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam dalam tahun 2005 ditetapkan sebesar Rp 47,1 triliun, yang bersumber dari SDA minyak bumi sebesar Rp 31,9 triliun dan SDA gas alam sebesar Rp 15,3 triliun.

Penerimaan SDA non migas meliputi penerimaan SDA pertambangan umum, SDA kehutanan, dan SDA perikanan. Dalam tahun 2005, kebijakan yang ditempuh antara lain; (i) implementasi PP Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; (ii) pembinaan dan pengelolaan usaha pertambangan sumber daya mineral dan batubara; (iii) upaya konservasi dan rehabilitasi SDA dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan; serta (iv) optimalisasi produksi dan penyediaan bahan baku mineral, batubara, dan panas bumi dalam upaya meningkatkan devisa.

Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, dalam APBN 2005 ini penerimaan SDA pertambangan umum ditetapkan Rp 2,0 triliun atau 0,1% terhadap PDB. Jumlah tersebut meliputi penerimaan iuran tetap (*landrent*) Rp 0,04 triliun, dan penerimaan iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*) Rp 1,97 triliun. Di bidang penerimaan SDA kehutanan, kebijakan yang akan ditempuh disamping diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan, juga ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari. Berdasarkan kebijakan tersebut, penerimaan SDA kehutanan ditetapkan Rp 1,1 triliun atau 0,1% terhadap PDB. Jumlah tersebut meliputi dana reboisasi (DR) Rp 0,8 triliun, provisi

sumber daya hutan (PSDH) Rp 0,3 triliun, dan iuran hak pengusahaan hutan (IHPH) Rp 6,0 milyar. Sedangkan SDA perikanan, tahun 2005 ditetapkan sebesar Rp 0,7 triliun.

Di bidang penerimaan laba BUMN, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan kesehatan BUMN serta meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata pengelolaan perusahaan yang baik dan sehat (*good corporate governance*). Berdasarkan hal tersebut, maka penerimaan pemerintah atas laba BUMN dalam APBN 2005 ditetapkan Rp 10,5 triliun atau 0,5% terhadap PDB. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak lainnya (PNBP lainnya) dalam tahun 2005 pemerintah menargetkan dapat mencapai Rp 20,3 triliun atau 0,9 % terhadap PDB. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah terus melanjutkan upaya peningkatan jenis penerimaan ini dengan melakukan peninjauan kembali berbagai tarif pungutan dari berbagai departemen/LPND, peningkatan upaya penarikan tunggakan, serta peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetorannya ke kas negara.

II.3. Hibah

Berdasarkan beberapa komitmen yang disepakati oleh negara/lembaga donor pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, penerimaan negara dari hibah dalam APBN 2005 ditetapkan mencapai Rp 750,0 miliar, yang berarti naik Rp 12,3 milyar dari penerimaan hibah dalam APBN-P 2004 yang mencapai Rp 737,7 milyar.

III. Belanja Negara

III.1. Belanja Pemerintah Pusat

Dengan penerapan format baru belanja negara, khususnya di sisi belanja pemerintah pusat, maka tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin dengan belanja pembangunan. Selama ini, pengelompokan belanja pemerintah pusat dalam bentuk belanja rutin dan belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya anggaran pembangunan, dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran.

Penyusunan anggaran belanja pemerintah pusat yang bersifat terpadu diikuti dengan perubahan format dalam APBN 2005 menjadi terinci menurut jenis belanja, organisasi, dan fungsi. Menurut **jenis belanja**, anggaran belanja pemerintah pusat terdiri dari 1) belanja pegawai, 2) belanja barang, 3) belanja modal, 4) pembayaran bunga utang, 5) subsidi, 6) belanja hibah, 7) bantuan sosial, dan 8) belanja lain-lain. Sedangkan anggaran belanja pusat menurut **organisasi** akan disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga. Adapun belanja pemerintah pusat menurut **fungsi** dibedakan dalam 11 fungsi, yaitu 1) pelayanan umum, 2) pertahanan, 3) ketertiban dan keamanan, 4) ekonomi, 5) lingkungan hidup, 6) perumahan dan fasilitas umum, 7) kesehatan, 8) pariwisata dan budaya, 9) agama, 10) pendidikan, dan 11) perlindungan sosial.

Dalam APBN 2005, anggaran belanja negara ditetapkan Rp 397,8 triliun atau 18,2% terhadap PDB. Dari jumlah tersebut sebesar 66,9% atau Rp 266,2 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat, dan sebesar 33,1% atau Rp 131,5 triliun untuk belanja daerah.

Belanja pemerintah pusat sebesar Rp 397,8 triliun atau 18,2% terhadap PDB tersebut diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam pembayaran gaji aparatur negara, pelaksanaan fungsi pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat, pengadaan sarana dan prasarana pembangunan, pemberian subsidi, serta pemenuhan kewajiban pemerintah pada pihak ketiga.

Dalam APBN 2005 anggaran belanja pemerintah pusat menurut **jenis belanja**, alokasi belanja pegawai ditetapkan Rp 60,7 triliun yang diarahkan untuk menjaga kelancaran kegiatan operasional pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Alokasi belanja barang ditetapkan Rp 34,0 triliun yang diarahkan untuk mempertahankan fungsi pelayanan publik setiap instansi pemerintah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, dan pemeliharaan aset negara. Alokasi belanja modal ditetapkan Rp 43,1 triliun yang diarahkan untuk mempercepat penyediaan sarana dan prasarana fisik yang manfaatnya dapat dinikmati untuk lebih dari satu tahun anggaran. Alokasi pembayaran bunga utang

ditetapkan Rp 64,1 triliun, hal tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya perkiraan tingkat suku bunga SBI-3 bulan dalam tahun 2005 yakni sebesar 6,5%. Alokasi subsidi ditetapkan Rp 31,1 triliun yang dialokasikan sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu dan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi sebagian kebutuhannya, serta membantu BUMN yang melaksanakan tugas pelayanan umum. Sementara itu alokasi dana untuk belanja hibah dalam APBN 2005 belum dapat ditetapkan, berkaitan dengan belum adanya rencana untuk memberikan bantuan atau sumbangan yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau lembaga internasional, seperti bantuan kemanusiaan. Alokasi bantuan sosial ditetapkan Rp 17,1 triliun yang diberikan dalam bentuk cadangan anggaran untuk penanggulangan bencana dan bantuan yang diberikan melalui kementerian negara/lembaga. Sedangkan alokasi belanja lain-lain ditetapkan Rp 15,8 triliun, dimana pemanfaatan belanja lain-lain ini adalah untuk menampung belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja yang telah disebutkan di atas, dan dana cadangan umum.

Anggaran belanja pemerintah pusat menurut *organisasi* dalam APBN 2005 diperuntukkan bagi seluruh kementerian negara/lembaga selaku pengguna anggaran sebesar Rp 127,4 triliun, dan kepada Departemen Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp 138,8 triliun yang akan dipergunakan untuk program: *a)* pembayaran bunga utang, *b)* subsidi dan transfer lainnya, serta *c)* belanja lain-lain.

Sedangkan anggaran belanja pemerintah pusat menurut *fungsi* yang terdiri dari subfungsi-subfungsi, yang merupakan kumpulan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga dalam rangka melaksanakan 3 (tiga) agenda pokok pembangunan, yaitu *1)* mempercepat penyelesaian reformasi, *2)* meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan *3)* memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Membandingkan antara rincian belanja menurut fungsi dan menurut sektor, pada hakekatnya adalah bahwa klasifikasi fungsi, subfungsi dan program merupakan pengganti klasifikasi sektor, subsektor dan program yang semula terbagi dalam anggaran rutin dan

anggaran pembangunan. Dengan demikian rincian belanja negara baik menurut fungsi maupun menurut sektor merupakan kompilasi dari program-program yang dilaksanakan kementerian negara/lembaga. Dengan berubahnya sebagian nama-mana program dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2005, maka program-program yang terdapat dalam belanja negara menurut fungsi dalam APBN 2005 *tidak dapat dipersandingkan* dengan program-program yang terinci dalam belanja negara menurut sektor dalam APBN 2004. Disamping itu, tidak seluruh program-program yang diajukan kementerian negara/lembaga pada tahun 2004 dapat dikonversikan ke dalam program-program yang diajukan pada tahun 2005, sebagai akibat adanya usulan program baru dan adanya pemecahan atau penggabungan program.

III.2. Belanja Untuk Daerah

Anggaran belanja untuk daerah dalam APBN 2005 ditetapkan sebesar Rp 131,5 triliun atau 6,0% terhadap PDB. Jumlah ini secara nominal mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan APBN-P 2004. Dari seluruh jumlah anggaran belanja untuk daerah tersebut, sekitar 94,5% dialokasikan untuk Dana Perimbangan, sedangkan sisanya sebesar 5,5% dialokasikan untuk Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Kebijakan dana perimbangan dalam tahun 2005 diarahkan terutama untuk i) memperkuat koreksi ketimpangan horizontal, ii) meningkatkan pelayanan publik, dan iii) meningkatkan efisiensi melalui anggaran kinerja berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam APBN tahun 2005, alokasi Dana Perimbangan ditetapkan Rp 124,3 triliun atau 5,7% terhadap PDB, yang terdiri dari DBH sebesar Rp 31,2 triliun atau 1,4% terhadap PDB, DAU sebesar Rp 88,8 triliun atau 4,1% terhadap PDB, dan DAK sebesar Rp 4,3 triliun atau 0,2% terhadap PDB.

Tabel : C
Table

BELANJA NEGARA
Government Expenditures
2004 - 2005
(Triliun Rupiah/Billion Rupiahs)

Jenis Pengeluaran / <i>Kind of Expenditures</i>	2004		2005	
	APBN-P	% thd PDB	APBN	% thd PDB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengeluaran / Expenditures	430,0	21,6	397,8	18,2
Belanja Pemerintah Pusat / Central Government Expenditures 1)	300,0	15,1	266,2	12,2
Belanja Rutin / <i>Current Expenditures</i>	228,1	11,5	-	-
Belanja Pembangunan / <i>Development Expenditures</i>	71,9	3,6	-	-
Belanja Untuk Daerah / Expenditure for Regions	130,0	6,5	131,5	6,0
Dana Perimbangan / Balance Funds	123,1	6,2	124,3	5,7
Dana Bagi Hasil / <i>Revenue Sharing Funds</i>	37,4	1,9	31,6	1,4
Dana Alokasi Umum / <i>General Allocation Funds</i>	82,1	4,1	88,8	4,1
Dana Alokasi Khusus / <i>Special Allocation Funds</i>	3,7	0,2	4,3	0,2
Dana Otonomi Khusus dan Palembang's / Special Autonomy and Balancing Funds	6,9	0,3	7,2	0,3
Dana Otonomi Khusus / <i>Special Autonomy Funds</i>	1,6	0,1	1,8	0,1
Dana Penyesuaian / <i>Balancing Funds</i> ¹⁾	5,2	0,3	5,5	0,2

Sumber/Source : Departemen Keuangan / *Ministry of Finance*

Catatan/Note : ¹⁾ Mulai tahun 2005 diterapkan anggaran belanja terpadu, yaitu menyatukan anggaran belanja rutin dengan belanja pembangunan/*Since 2005 is using unified budget, that included of the budgeted current expenditures and the budgeted development expenditures*

: Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan/*Difference of one digit on the last figures are caused by rounded off*

Selain dalam bentuk Dana Perimbangan, dana yang dialokasikan untuk daerah juga dalam bentuk Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Dana Otonomi Khusus dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Dana Otonomi Khusus disediakan untuk propinsi Papua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi propinsi Papua, yaitu sebesar 2% dari jumlah DAU. Dana Penyesuaian terdiri dari dana penyesuaian Murni dan Dana Penyesuaian Ad Hoc. Dalam tahun 2005 Dana Penyesuaian dialokasikan bagi daerah-daerah yang memperoleh DAU lebih kecil dari DAU tahun sebelumnya ditambah Dana Penyesuaian Murni tahun

sebelumnya. Sedangkan Dana Penyesuaian Ad Hoc disediakan untuk mengantisipasi kebijaksanaan Pemerintah Pusat dalam rangka perbaikan penghasilan bagi PNS berupa pemberian gaji ke-13. Dalam tahun 2005, dana otonomi khusus ditetapkan Rp 1,8 triliun atau 0,1% terhadap PDB, sedangkan Dana Penyesuaian ditetapkan sebesar Rp 5,5 triliun atau 0,2% terhadap PDB.

IV. Pembiayaan Defisit

Berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan ekonomi makro dan faktor-faktor lain yang berpengaruh, pembiayaan APBN dalam tahun 2004 masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Beratnya tantangan tersebut tercermin dari defisit anggaran yang terjadi yaitu sebesar Rp 17,4 triliun atau 0,8% terhadap PDB, hal ini terjadi karena adanya selisih kurang pada pendapatan negara dan hibah yang diperkirakan sebesar Rp 380,4 triliun terhadap belanja negara yang ditetapkan sebesar Rp 397,8 triliun. Untuk menutupi defisit ini pemerintah dipandang perlu untuk menempuh kebijakan yang dapat memungkinkan peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan yang bersumber dari perbankan dalam negeri maupun luar negeri, dari dalam negeri diperkirakan akan memperoleh dana sebesar Rp 37,6 triliun dan dari luar negeri diperkirakan sebesar negatif Rp 20,2 triliun.

Pembiayaan dalam negeri bersumber dari perbankan dalam negeri direncanakan sebesar Rp 9,0 triliun atau 0,4% terhadap PDB yang berasal dari penggunaan dana rekening-rekening pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia antara lain rekening dana investasi (RDI), sedangkan Pembiayaan yang bersumber dari non perbankan dalam negeri direncanakan sebesar Rp 28,6 triliun atau 1,3% terhadap PDB, yang berasal dari hasil privatisasi BUMN, hasil penjualan aset program restrukturisasi perbankan, dan hasil penerbitan surat utang negara.

Pembiayaan yang bersumber dari luar negeri (neto) direncanakan sebesar negatif Rp 20,2 triliun atau negatif 0,9% terhadap PDB. Hal ini terutama berkaitan dengan lebih rendahnya perkiraan pinjaman luar negeri yang dapat ditarik dalam tahun 2004 dibandingkan dengan meningkatnya kewajiban pembayaran cicilan pokok utang yang

jatuh tempo. Dalam APBN tahun 2005, penarikan pinjaman luar negeri direncanakan sebesar Rp 26,6 triliun atau 1,2% terhadap PDB, yang berasal dari pinjaman program Rp 8,6 triliun dan pinjaman proyek Rp 18,0 triliun. Sementara itu, kewajiban pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang telah jatuh tempo direncanakan sebesar negatif Rp 46,8 triliun. Tingginya kewajiban amortisasi utang luar negeri ini terutama berkaitan dengan telah berakhirnya fasilitas penundaan pembayaran utang luar negeri (*rescheduling*) yang diperoleh dalam beberapa tahun anggaran terakhir melalui forum *Paris Club I, Paris Club II, dan Paris Club III*.

Tabel : D
Table

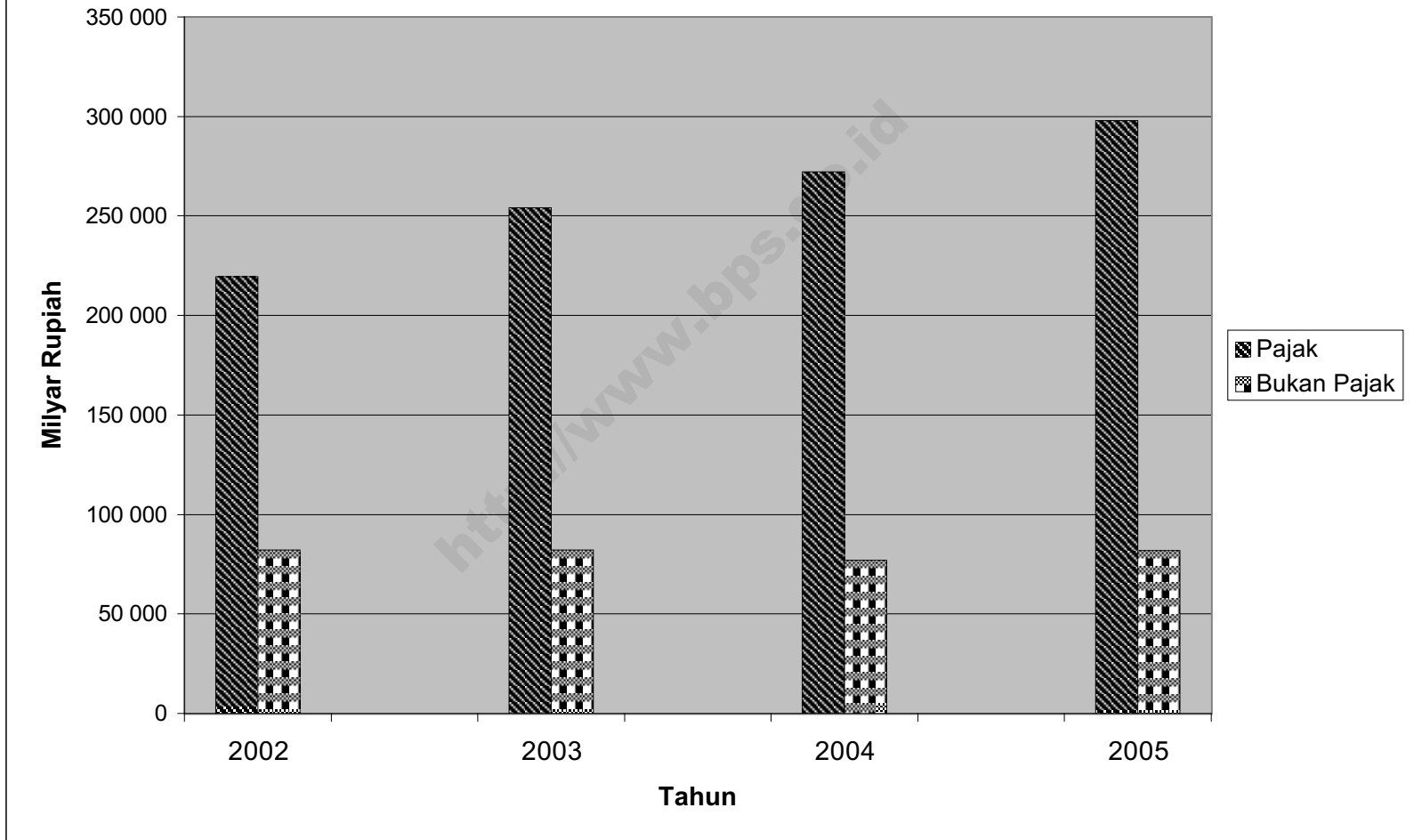
PEMBIAYAAN DEFISIT
Devisit Financing
2004 - 2005
(Triliun Rupiah/Billion Rupiahs)

Jenis Pembiayaan / <i>Kind of Financing</i>	2004		2005	
	APBN-P	% thd PDB	APBN	% thd PDB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembiayaan Bersih / <i>Financing net</i>	26,3	1,3	17,4	0,8
Pembiayaan Dalam Negeri / <i>Domestic Financing</i>	50,1	2,5	37,6	1,7
Perbankan Dalam Negeri / <i>Domestic Bank Financing</i>	23,9	1,2	9,0	0,4
Non Perbankan Dalam Negeri / <i>Domestic Non Bank Financing</i>	26,1	1,3	28,6	1,3
Pembiayaan Luar Negeri / <i>Foreign Financing (Neto)</i>	-23,8	-1,2	-20,2	-0,9
Pinjaman Luar Negeri (Bruto) / <i>Gross Drawing</i>	21,7	1,1	26,6	1,2
Pinjaman Program / <i>Program Aid</i>	3,1	0,2	8,6	0,4
Pinjaman Proyek / <i>Project Aid</i>	18,6	0,8	18,0	0,8
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri / <i>Amortization</i>	-45,5	-2,3	-46,8	-2,1

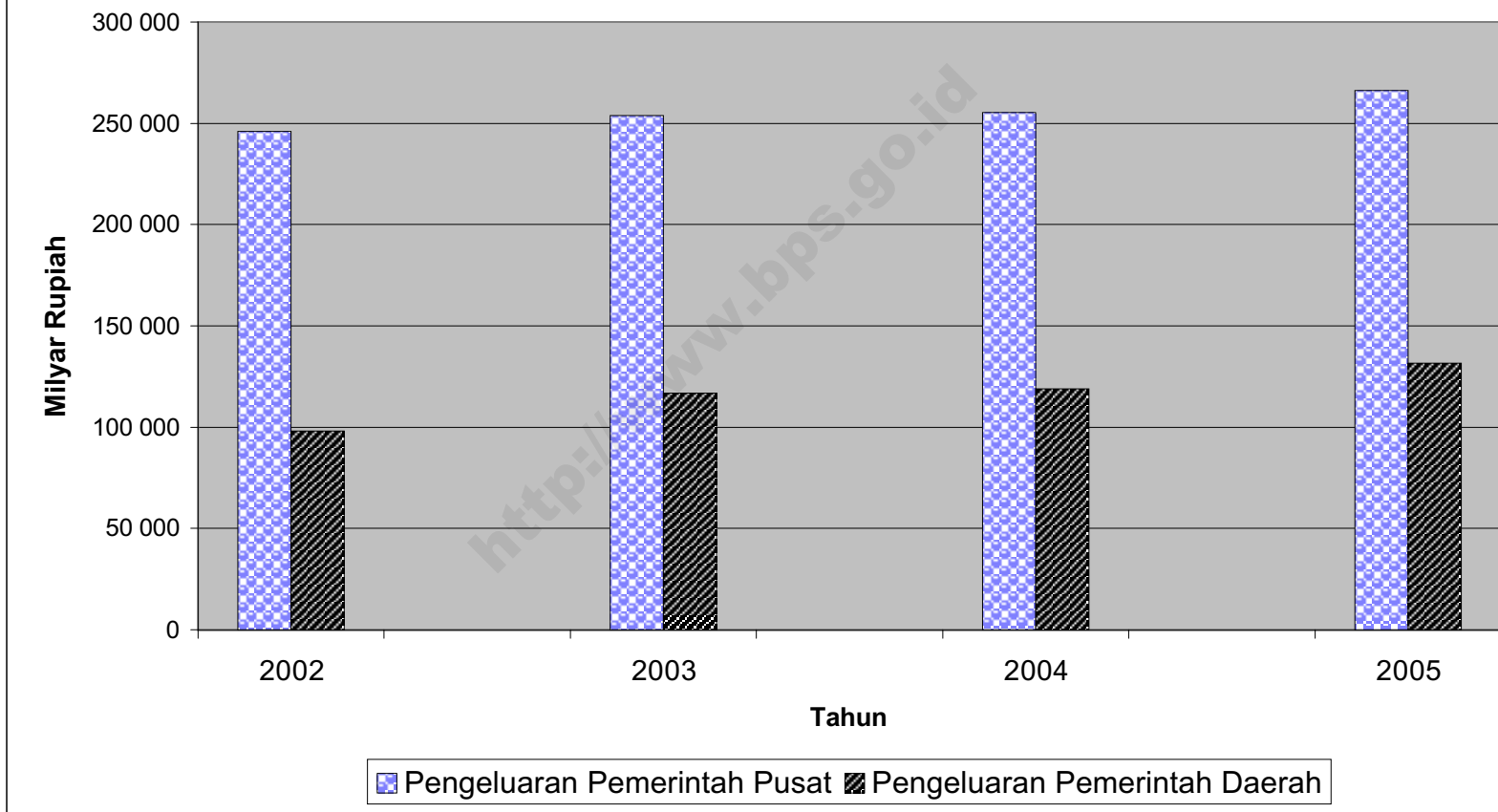
Sumber/Source : Departemen Keuangan / *Ministry of Finance*

Catatan/Note : Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan/
Difference of one digit on the last figures are caused by rounded off

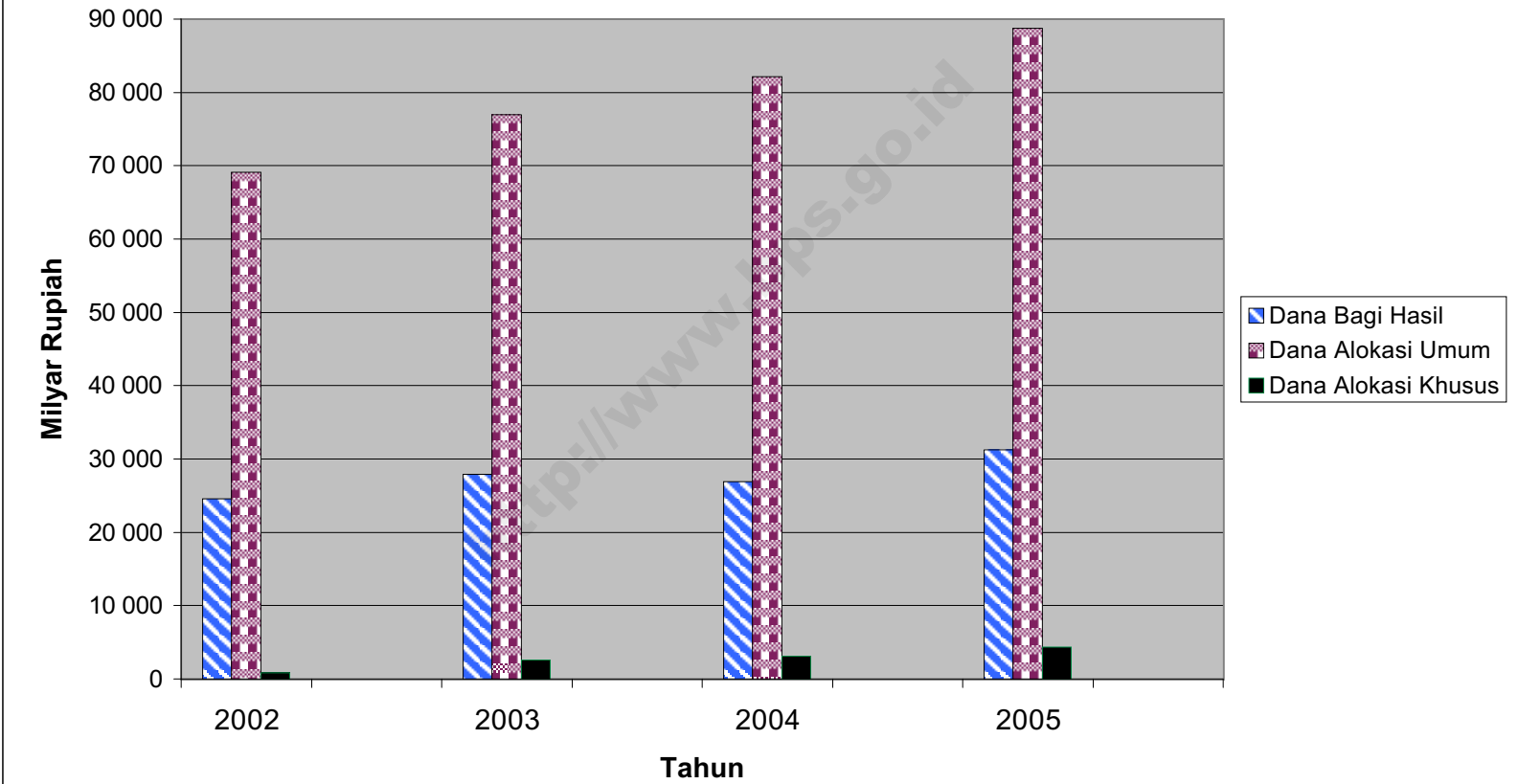
**Grafik 1. Anggaran Pendapatan Negara
Tahun 2002 - 2005**



**Grafik 2. Anggaran Belanja Negara
Tahun 2002 - 2005**



Grafik 3. Anggaran Dana Perimbangan Tahun 2002 - 2005



TABEL

TABLE

<http://www.bps.go.id>

Tabel
Tabel : 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1)
State Budget
2002 – 2005 3)
(Milyar Rupiah/Billion Rupiahs)

Perincian/Description	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan dan Hibah / Revenue and Grants	301 874	336 155	349 934	380 377
Penerimaan Dalam Negeri / Domestic Revenue	301 874	336 155	349 300	379 627
Penerimaan Pajak / Tax Revenue	219 627	254 140	272 175	297 844
Pajak Dalam Negeri / Domestic Taxes	207 029	241 742	260 224	285 481
Pajak Perdagangan Internasional / International Trade Taxes	12 598	12 398	11 951	12 363
Penerimaan Bukan Pajak / Non Tax Revenue	82 247	82 015	77 124	81 783
Penerimaan Sumber Daya Alam / Natural Resources Revenue	63 196	59 395	47 240	50 941
Bagian Laba BUMN / Profit Transfer from SOE's	10 351	10 414	11 454	10 591
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya / Other Non Tax Revenue	8 700	12 206	18 430	20 250
Hibah / Grants	-	-	634	750
Pengeluaran / Expenditures	344 009	370 592	374 351	397 769
Pengeluaran Pemerintah Pusat / Central Government Expenditures 2)	246 040	253 714	255 309	266 220
Pengeluaran Rutin / Current Expenditures	193 741	188 584	184 438	-
Pengeluaran Pembangunan / Development Expenditures	52 299	65 130	70 871	-
Pembiayaan Rupiah / Rupiah Financing	26 469	46 230	50 500	-
Pembiayaan Proyek / Project Aid	25 830	18 900	20 371	-
Pengeluaran Untuk Daerah / Regional Budget Expenditures	97 969	116 878	119 042	131 549
Dana Perimbangan / Balanced Budget	94 532	107 491	112 187	124 307
Dana Bagi Hasil / Revenue Sharing Fund	24 601	27 896	26 928	31 218
Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	69 114	76 978	82 131	88 766
Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	817	2 617	3 128	4 323
Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang / Special Autonomy and Balancing Fund	3 437	9 387	6855	7242
Keseimbangan Primer / Primary Balance	46 365	47 538	41 234	46 745
Surplus atau Defisit Anggaran / Overall Balance	- 42 135	- 34 436	- 24 418	- 17 392
Pembiayaan Bersih / Financing Net	42 134	34 436	24 418	17 392
Pembiayaan dalam Negeri / Domestic Financing	23 501	22 450	40 557	37 586
Perbankan Dalam Negeri / Domestic Bank Financing	-	8 500	19 199	9 000
Non Perbankan Dalam Negeri / Domestic Non Banking Financing	23 501	13 950	21 358	28 586
Pembiayaan Luar Negeri / Foreign Financing	18 633	11 986	- 16 139	- 20 194
Pinjaman Bruto Luar Negeri / Gross Drawing	62 600	29 250	28 237	26 643
Pembayaran Cicilan pokok utang Luar Negeri / Amortizations	- 43 967	- 17 264	- 44 376	- 46 837

Sumber/Source : Departemen Keuangan / Ministry of Finance

Catatan/Note : 1) Angka sebelum perubahan / Figure before change

2) Mulai tahun 2005 diterapkan anggaran belanja terpadu, yaitu menyatukan anggaran belanja rutin dengan belanja pembangunan/Since 2005 is using unified budget, that included of the budgeted current expenditures and the budgeted development expenditures

3) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan/
Difference of one digit on the last figures are caused by rounded off

Tabel : 2
Table

Anggaran Pendapatan Negara 1)
The Budgeted Government Revenues
2003 – 2005 2)
(Milyar Rupiah/Billion Rupiahs)

Sumber Penerimaan / Source of Revenues	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)
Penerimaan Dalam Negeri / Domestic Revenues	336 155	349 300	379 627
Penerimaan Pajak / Tax Revenues	254 140	272 175	297 844
Pajak Dalam Negeri / Domestic Taxes	241 742	260 224	285 481
Pajak Penghasilan / <i>Income Tax</i>	120 925	133 968	142 193
Non Migas / <i>Non Oil and Gas</i>	106 149	120 835	128 624
Migas / <i>Oil and Gas</i>	14 776	13 133	13 569
Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah / <i>Value Added Tax on Goods & Services, and Tax on Sale of Luxury Goods</i>	80 790	86 273	98 828
Pajak Bumi dan Bangunan / <i>Land and Building Tax</i>	7 524	8 031	10 272
Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan / <i>Tax of Rights in Land and Building</i>	2 402	2 668	3 215
Cukai / <i>Excises Duties</i>	27 945	27 671	28 934
Pajak Lainnya / <i>Others Domestic Taxes</i>	2 157	1 614	2 040
Pajak Perdagangan Internasional / International Trade Taxes	12 398	11 951	12 363
Bea Masuk / <i>Import Duties</i>	11 960	11 636	12 018
Pajak Ekspor / <i>Export Tax</i>	438	315	345
Penerimaan Bukan Pajak / Non Tax Revenues	82 015	77 124	81 783
Penerimaan Sumber Daya Alam / Natural Resources Revenue	59 395	47 240	50 942
Penerimaan Minyak Bumi / <i>Oil Revenues</i>	39 910	28 248	31 856
Penerimaan Gas Alam / <i>Natural Gas Revenues</i>	16 284	15 754	15 265
Penerimaan Pertambangan Umum / <i>General Mining Revenues</i>	1 483	1 628	2 019
Penerimaan Kehutanan / <i>Forestry Revenues</i>	1 268	1 010	1 102
Penerimaan Perikanan / <i>Fishery Revenues</i>	450	600	700
Bagian laba BUMN / Profit Transfer from SOE's	10 414	11 454	10 591
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya / Other Non Tax Revenues	12 206	18 430	20 250
Hibah / Grants	0	634	750
Jumlah / Total	336 155	349 934	380 377

Sumber/Source : Departemen Keuangan / *Ministry of Finance*

Catatan/Note : 1) Angka sebelum perubahan / *Figure before change*

2) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan/
Difference of one digit on the last figures are caused by rounded off

Tabel
Table : 3

Realisasi Pendapatan Negara
Actual Government Revenues
2002 – 2004 3)
(Triliun Rupiah/ Trillion Rupiahs)

Sumber Penerimaan / Source of Revenues	2002 1)	2003 1)	2004 2)
(1)	(2)	(3)	(4)
Penerimaan Dalam Negeri / Domestic Revenues	298,5	340,9	407,5
Penerimaan Pajak / Tax Revenues	210,1	242,0	280,8
Pajak Dalam Negeri / Domestic Taxes	199,5	230,9	268,1
Pajak Penghasilan / <i>Income Tax</i>	101,9	115,0	133,3
Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah / <i>Value Added Tax on Goods & Services and Tax on Sale of Luxury Goods</i>	65,1	77,1	87,5
Pajak Bumi dan Bangunan / <i>Land and Building Tax</i>	6,2	8,8	11,8
Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan / <i>Tax of Rights in Land and Building</i>	1,6	2,1	2,9
Cukai / <i>Excises Duties</i>	23,2	26,3	29,2
Pajak Lainnya / <i>Others Domestic Taxes</i>	1,5	1,6	3,4
Pajak Perdagangan Internasional / International Trade Taxes	10,6	11,1	12,7
Bea Masuk / <i>Import Duties</i>	10,4	10,9	12,4
Pajak Ekspor / <i>Export Tax</i>	0,2	0,2	0,3
Penerimaan Bukan Pajak / Non Tax Revenues	88,4	98,9	126,7
Penerimaan Sumber Daya Alam / <i>Natural Resources Revenue</i>	64,7	67,5	92,3
Bagian laba BUMN / <i>Profit Transfer from SOE's</i>	9,8	12,6	9,8
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya / <i>Other Non Tax Revenues</i>	13,9	18,8	24,6
Hibah / Grants	0,1	0,5	0,3
Jumlah / Total	298,6	341,4	407,8

Sumber/Source : Departemen Keuangan / *Ministry of Finance*

Catatan/Note : 1) Angka PAN (Perhitungan Anggaran Negara) / *PAN Figure (Audited State Budget)*

2) Realisasi Januari – Desember / *Actual January – December*

3) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan/
Difference of one digit on the last figures are caused by rounded off

Tabel
Tabel : 4

Anggaran Belanja Negara 1)
The Budgeted Government Expenditures
2003 – 2005 3)
(Milyar Rupiah/Billion Rupiahs)

Jenis Pengeluaran/Kind of Expenditures	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengeluaran Pemerintah Pusat / Central Government Expenditures	253 714	255 309	266 220
Pengeluaran Rutin / Current Expenditures 2)	188 584	184 438	-
Belanja Pegawai / <i>Personnel</i>	50 241	56 738	-
Belanja Barang / <i>Goods and Services</i>	15 427	17 280	-
Pembayaran Bunga Hutang / <i>Interest Payment</i>	81 975	65 651	-
Hutang Dalam Negeri / <i>Domestic Interest</i>	55 180	41 276	-
Hutang Luar Negeri / <i>External Interest</i>	26 795	24 375	-
Subsidi / <i>Subsidies</i>	25 465	26 362	-
Subsidi BBM / <i>Oil Subsidies</i>	13 210	14 527	-
Subsidi Non BBM / <i>Non Oil Subsidies</i>	12 255	11 835	-
Pengeluaran Rutin Lainnya / <i>Others Current Expenditures</i>	15 476	18 407	-
Pengeluaran Pembangunan / Development Expenditures 2)	65 130	70 871	-
Pembiayaan Rupiah / <i>Rupiah Financing</i>	46 230	50 500	-
Pembiayaan Proyek / <i>Project Aid</i>	18 900	20 371	-
Pengeluaran Untuk Daerah / Regional Budget Expenditures	116 878	119 042	131 549
Dana Perimbangan / <i>Balanced Budget</i>	107 491	112 187	124 307
Dana Bagi Hasil / <i>Revenue Sharing Fund</i>	27 896	26 928	31 218
Dana Alokasi Umum / <i>General Allocation Fund</i>	76 978	82 131	88 766
Dana Alokasi Khusus / <i>Special Allocation Fund</i>	2 617	3 128	4 323
Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang	9 387	6 855	7 242
J u m l a h / T o t a l	370.592	374.351	397.769

Sumber/Source : Departemen Keuangan / *Ministry of Finance*

Catatan/Note : 1) Angka sebelum perubahan / *Figure before change*

2) Mulai tahun 2005 diterapkan anggaran belanja terpadu, yaitu menyatukan anggaran belanja rutin dengan belanja pembangunan/*Since 2005 is using unified budget, that included of the budgeted current expenditures and the budgeted development expenditures*

3) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan/*Difference of one digit on the last figures are caused by rounded off*

Tabel
Table : 5

Realisasi Belanja Negara
Actual Government Expenditures
2002 – 2004 3)
(Triliun Rupiah/Trillion Rupiahs)

Jenis Pengeluaran / Kind of Expenditures	2002 1)	2003 1)	2004 2)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengeluaran Pemerintah Pusat / Central Governments	224,0	256,2	306,1
Pengeluaran Rutin / <i>Current Expenditures</i>	186,7	186,9	237,7
Pengeluaran Pembangunan / <i>Development Expenditures</i>	37,3	69,2	68,4
Pembiayaan Rupiah / <i>Rupiah Financing</i>	25,6	50,3	50,9
Pembiayaan Proyek / <i>Project Aid</i>	11,7	18,9	17,4
Pengeluaran Untuk Daerah / <i>Regional Budget Expenditures</i>	98,2	120,3	129,6
Dana Perimbangan / <i>Balanced Budget</i>	94,6	111,1	122,8
Dana Bagi Hasil / <i>Revenue Sharing Fund</i>	24,9	31,4	36,6
Dana Alokasi Umum / <i>General Allocation Fund</i>	69,2	77,0	82,1
Dana Alokasi Khusus / <i>Special Allocation Fund</i>	0,6	2,7	4,1
Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang / <i>Special Autonomy and Balancing Fund</i>	3,6	9,2	6,8
Dana Otonomi Khusus / <i>Special Autonomy Fund</i>	1,2	1,5	1,5
Dana Penyeimbang / <i>Balancing Fund</i>	2,4	7,7	7,7
Jumlah / Total	322,2	376,5	435,7

Sumber/Source : Departemen Keuangan / *Ministry of Finance*

Catatan/Note : 1) Angka PAN (Perhitungan Anggaran Negara) / *PAN Figure (Audited State Budget)*

2) Realisasi Januari – Desember / *Actual January – December*

3) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan/
Difference of one digit on the last figures are caused by rounded off

Tabel
Table : 6

Anggaran Penerimaan Pajak 1)
The Budgeted Tax Revenues
2003 – 2005 2)
(Milyar Rupiah/Billion Rupiahs)

Sumber Penerimaan / Source of Revenues	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)
Pajak Dalam Negeri / Domestic Taxes	241 742	260 224	285 481
I. Pajak Penghasilan (Pph) / Income Tax	120 925	133 968	142 193
1. Migas / Oil and Gas	14 776	13 133	13 569
a. Minyak Bumi / Oil	4 745	3 537	3 613
b. Gas Alam / Natural Gas	10 031	9 596	9 956
2. Non Migas / Non Oil and Gas	106 149	120 835	128 624
a. Pasal 21	25 082	27 913	29 276
b. Pasal 22	8 214	10 271	11 627
c. Pasal 23	15 845	14 017	13 048
d. Pasal 25/29	39 671	46 401	51 164
e. Pasal 26	4 293	6 042	7 313
f. PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	13 043	16 192	16 196
II. Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah / Value Added Tax on Goods & Services, and Tax on Sale of Luxury Goods	80 790	86 273	98 828
III. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) / Land and Building Tax and Duties on Land and Building transfer	9 925	10 699	13 487
1. PBB / Land and Building Tax	7 524	8 031	10 272
2. BPHTB / Duties on Land and Building Transfer	2 402	2 668	3 215
IV. Cukai / Excises Duties	27 646	27 671	28 934
V. Pajak Lainnya / Others Domestic Taxes	2 157	1 614	2 040
Pajak Perdagangan Internasional / International Trade Taxes	12 398	11 951	12 363
I. Bea Masuk / Import Duties	11 960	11 636	12 018
II. Pajak Ekspor / Export Tax	438	315	345
Jumlah / Total	254 140	272 175	297 844

Sumber/Source : Departemen Keuangan / Ministry of Finance

Catatan/Note : 1) Angka sebelum perubahan / Figure before change

2) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan/
Difference of one digit on the last figures are caused by rounded off

Tabel
Table : 7

Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak 1)
The Budgeted Non Tax Revenues
2003 – 2005 2)
(Milyar Rupiah/Billion Rupiahs)

Sumber Penerimaan / Source of Revenues	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)
Penerimaan Bukan Pajak / Non Tax Revenues	82 015	77 124	81 783
I. Penerimaan Sumber Daya Alam / Natural Resource Revenues	59 396	47 240	50 942
1. Penerimaan Minyak Bumi / Oil Revenues	39 911	28 248	31 856
2. Penerimaan Gas Alam / Natural Gas Revenues	16 284	15 754	15 265
3. Penerimaan Pertambangan Umum / General Mining Revenues	1 483	1 628	2 019
a. Iuran Tetap / Landrent	46	47	45
b. Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi / Royalty	1 437	1 582	1 974
4. Penerimaan Kehutanan / Forestry Revenues	1 268	1 010	1 102
a. Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) / Forest Exploitation Lisence Fee	4	6	6
b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) / Forest Provision Fee	396	280	323
c. Dana Reboisasi / Reforestry Fund	869	724	773
5. Penerimaan Perikanan / Fishery Revenues	450	600	700
II. Bagian laba BUMN / Profit Transfer from SOE's	10 414	11 454	10 591
III. Penerimaan Bukan Pajak Lainnya / Other Non Tax Revenues	12 206	18 430	20 250
1. Pendapatan Penjualan	948	1 066	1 246
2. Pendapatan Sewa	12	20	25
3. Pendapatan Jasa	2 539	4 904	5 359
4. Pendapatan Bukan Pajak dari Luar Negeri	173	199	456
5. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan	20	19	19
6. Pendapatan Pendidikan	1 505	2 845	3 600
7. Pendapatan Pelunasan Piutang	7 000	6 850	6 250
8. Premi Penjamin	-	2 500	-
9. Pendapatan Lain-lain	9	27	3 295
Hibah / Grants	-	634	750
Jumlah / Total	82 015	77 758	82 533

Sumber/Source : Departemen Keuangan / Ministry of Finance

Catatan/Note : 1) Angka sebelum perubahan / Figure before change

2) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan/
Difference of one digit on the last figures are caused by rounded off

Tabel : 8
Table

Realisasi Penerimaan Dalam Negeri
Actual Domestic Revenues
1989/1990 – 2005 1)
(Milyar Rupiah/Billion Rupiahs)

Tahun Anggaran / Fiscal Year	Perpajakan / Tax 2)		Bukan Pajak / Non Tax 3)		Jumlah / Total	
	Nilai/Billion of Rp	(%)	Nilai/Billion of Rp	(%)	Nilai/Billion of Rp	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
REPELITA V						
1989/1990	16 084	51,0	15 420	48,9	31 504	100,0
1990/1991	22 011	52,2	20 182	47,8	42 193	100,0
1991/1992	24 919	58,5	17 663	41,5	42 582	100,0
1992/1993	30 092	61,6	18 771	38,4	48 863	100,0
1993/1994	36 665	65,3	19 448	34,7	56 113	100,0
REPELITA VI						
1994/1995	44 442	66,9	21 976	33,1	66 418	100,0
1995/1996	48 686	66,7	24 328	33,3	73 014	100,0
1996/1997	57 340	65,4	30 290	34,6	87 630	100,0
1997/1998	70 934	63,2	41 341	36,8	112 276	100,0
1998/1999	102 394	64,8	55 648	35,2	158 042	100,0
1999/2000 4)	125 951	61,6	78 482	38,4	204 433	100,0
2000 5)	115 912	56,5	89 422	43,5	205 334	100,0
2001	185 541	61,7	115 059	38,3	300 600	100,0
2002	210 088	70,4	88 440	29,6	298 528	100,0
2003	242 048	71,0	98 880	29,0	340 928	100,0
2004	280 898	68,9	126 684	31,1	407 582	100,0
(Realisasi Sementara)						
2005	297 844	78,5	81 783	21,5	379 627	100,0
(APBN)						

Sumber/Source

: Departemen Keuangan / Ministry of Finance

Catatan/Note

- 1) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena Pembulatan / *Difference of one digit on the last figures are caused by rounded off*
- 2) Sejak TA 1998/1999 termasuk BPHTB, sejak TA 1999/2000 termasuk Pph Migas, Tetapi tidak termasuk pajak daerah dan retribusi daerah / *Since FY 1998/1999 including Duty on Land and Building Transfer, since FY 1999/2000 including Income Tax on Oil and Gas but excluding regional taxes and retribution*
- 3) Sejak TA 1999/2000 tidak termasuk Pph Migas dan Privatisasi / *Since FY 1999/2000 excluding income tax on oil and gas and privatization procees*
- 4) Disesuaikan dengan klasifikasi baru / *Adjusted to new classification*
- 5) Periode 1 April s.d 31 Desember 2000 / *Period from April 1st to December 31st, 2000*

Tabel : 9
Table

Realisasi Penerimaan Perpajakan
Actual Tax Revenues
1989/1990 – 2005 1)
(Milyar Rupiah/Billion Rupiahs)

Tahun Anggaran / <i>Fiscal Year</i>	Pajak Dalam Negeri / <i>Domestic Tax</i>				Pajak Perdagangan Internasional / <i>International Trade Tax</i>		Jumlah / <i>Total</i>	
	Pph / <i>Income Tax</i>	PPN / Value Added Tax	PBB / Land and Building Tax	Cukai / Excises	Pajak Lainnya / Other Tax	Bea Masuk / Import Duties	Pajak Ekspor / Export Tax	Jumlah / <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)
REPELITA V								
1989/1990	5 755	5 986	604	1 482	191	1 892	173	16 084
1990/1991	8 250	8 119	786	1 800	216	2 800	40	22 011
1991/1992	9 727	9 146	944	1 915	299	2 871	17	24 919
1992/1993	12 516	10 742	1 107	2 242	252	3 223	9	30 092
1993/1994	14 759	13 944	1 484	2 626	283	3 555	14	36 665
REPELITA VI								
1994/1995	18 764	16 545	1 647	3 153	302	3 900	131	44 442
1995/1996	21 012	18 519	1 894	3 593	453	3 029	186	48 686
1996/1997	27 062	20 351	2 413	4 263	591	2 579	81	57 340
1997/1998	34 388	25 199	2 641	5 101	478	2 999	128	70 934
1998/1999	55 944	27 803	3 565	7 733	413	2 306	4 630	102 394
1999/2000	72 729	33 087	4 107	10 381	611	4 177	859	125 951
2000	57 073	35 232	4 456	11 287	837	6 697	331	115 912
2001	94 576	55 957	6 663	17 394	1 384	9 026	541	185 541
2002	101 874	65 153	7 828	23 189	1 469	10 344	231	210 088
2003	115 016	77 082	10 905	26 277	1 654	10 885	230	242 048
2004	134 904	87 567	14 680	29 172	1 832	12 444	298	280 898
(Realisasi Sementara)								
2005 (APBN)	142 193	98 828	13 487	28 934	2 040	12 018	345	297 844

Sumber/Source
Catatan/Note

: Departemen Keuangan / *Ministry of Finance*
: 1) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan/*Difference of one digit on the last figures are caused by rounded off*

Tabel
Tabel : 10

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Klasifikasi Ekonomi 1)
The Budget Central Government Expenditures by Economic Classification
2004 – 2005 2)
(Milyar Rupiah/Billion Rupiahs)

Klasifikasi Ekonomi/ <i>Economic Classification</i>	2004	2005
(1)	(2)	(3)
1. Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditure</i>	57.235,2	60.743,7
a. Gaji dan Tunjangan / <i>Salary and Allowances</i>	34.264,5	34.861,2
b. Honorarium, vakasi, dll / <i>Honorarium and Vacation</i>	4.444,7	6.648,9
c. Kontribusi Sosial / <i>Social Contribution</i>	18.526,0	19.233,6
2. Belanja Barang / <i>Material Expenditure</i>	35.639,8	34.038,6
a. Belanja Barang / <i>Material Expenditures</i>	13.320,1	14.766,6
b. Belanja Jasa / <i>Services Expenditures</i>	18.103,1	14.974,0
c. Belanja Pemeliharaan / <i>Maintenance Expenditures</i>	2.526,5	2.679,1
d. Belanja Perjalanan / <i>Traveling Expenditures</i>	1.690,1	1.618,8
3. Belanja Modal / <i>Capital Expenses</i>	39.775,1	43.078,9
4. Pembayaran Bunga Hutang / <i>Interest Payment</i>	65.651,0	64.136,8
a. Utang Dalam Negeri / <i>Interest of Domestic Debt</i>	41.275,9	38.994,5
b. Utang Luar Negeri / <i>Interest of Foreign Debt</i>	24.375,1	25.142,4
5. Subsidi / <i>Subsidies</i>	26.638,2	31.295,7
a. Perusahaan Negara / <i>SOE's</i>	26.589,6	31.221,8
i. Lembaga Keuangan / <i>Financial Institution</i>	853,4	771,8
ii. Lembaga Non Keuangan / <i>Non Financial Institution</i>	25.736,1	30.450,0
b. Perusahaan Swasta / <i>Private Enterprises</i>	48,6	73,9
6. Belanja Hibah / <i>Grants Expenditure</i>	-	-
7. Bantuan Sosial / <i>Social Assistance</i>	14.293,3	17.106,7
a. Penanggulangan Bencana / <i>Natural Disaster Rescue</i>	2.000,0	2.000,0
b. Bantuan yang diberikan oleh K/L / <i>Ministry/Institution Assistance</i>	12.293,3	15.106,7
8. Belanja Lain-lain / <i>Other Expenditures</i>	16.076,5	15.819,9
J u m l a h / T o t a l	255.309,0	266.220,3

Sumber/Source : Departemen Keuangan / *Ministry of Finance*

Catatan/Note : 1) Angka sebelum perubahan / *Figure before change*

2) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan/
Difference of one digit on the last figures are caused by rounded off

Tabel : 11 **Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi 1)**
Tabel : 11 **The Budget Central Government Expenditures by Functions**
2005 2)
(Milyar Rupiah/Billion Rupiahs)

Fungsi / Function	2005
(1)	(2)
Pelayanan Umum / <i>General Public Services</i>	158 559
Pertahanan / <i>Defense</i>	22 001
Ketertiban dan Keamanan / <i>Public Order and Safety</i>	15 585
Ekonomi / <i>Economic Affairs</i>	28 016
Lingkungan Hidup / <i>Environmental Protection</i>	3 105
Perumahan dan Fasilitas Umum / <i>Housing and Community Amenities</i>	2 280
Kesehatan / <i>Health</i>	7 038
Pariwisata dan Budaya / <i>Tourism and Culture</i>	920
Agama / <i>Religion</i>	691
Pendidikan / <i>Education</i>	25 987
Perlindungan Sosial / <i>Social Protection</i>	2 036
J u m l a h / T o t a l	266 220

Catatan / Note : 1) Angka sebelum perubahan / *Figure before change*
2) Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena pembulatan/
Difference of one digit on the last figures are caused by rounded off

Sumber / Source : Departemen Keuangan / Ministry of Finance

Tabel
Tabel : 12

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi 1)
The Budget Central Government Expenditures by Organization
2005 2)
(Milyar Rupiah/Billion Rupiahs)

Organisasi / Organization	2005
(1)	(2)
BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN LEMBAGA/STATE MINISTRY/AGENCY	
Majelis Permusyawaratan Rakyat/ <i>Peopleconsultative Assembly</i>	218
Dewan Perwakilan Rakyat/ <i>House of Representative</i>	750
Badan Pemeriksa Keuangan/ <i>The Supreme Audit Board</i>	226
Mahkamah Agung/ <i>Supreme Court</i>	1 105
Kejaksaan Agung/ <i>Attorney General</i>	858
Kepresidenan/ <i>Presidency</i>	727
Wakil Presiden/ <i>Vice President</i>	73
Departemen Dalam Negeri/ <i>Departement of Home Affairs</i>	884
Departemen Luar Negeri/ <i>Departement of Foreign Affairs</i>	3 748
Departemen Pertahanan/ <i>Departement of Defense</i>	21 979
Departemen Hukum dan HAM/ <i>Departement of Law and Human Rights</i>	1 607
Departemen Keuangan/ <i>Departement of Finance</i>	4 566
Departemen Pertanian/ <i>Departement of Agriculture</i>	4 025
Departemen Perindustrian/ <i>Departement of Industry</i>	1 415 3)
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral/ <i>Dept. of Energy and Mineral Resources</i>	3 297
Departemen Perhubungan/ <i>Departement of Communication (Transportation)</i>	5 826
Departemen Pendidikan Nasional/ <i>Departement of National Education</i>	21 585
Departemen Kesehatan/ <i>Departement of Health</i>	7 796
Departemen Agama/ <i>Departement of Religion Affairs</i>	6 690
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi/ <i>Dept. Of Manpower and Transmigration</i>	1 470
Departemen Sosial/ <i>Departement of Social Affairs</i>	2 022
Departemen Kehutanan/ <i>Departemen of Forestry</i>	1 279
Departemen Kelautan dan Perikanan/ <i>Ministry of Maritime and Fishery</i>	2 029
Departemen Pekerjaan Umum/ <i>Departement of Public Works</i>	13 082
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan/ <i>Ministry of Political, Law and Security</i>	68
Kementerian Koordinator Bid Perekonomian/ <i>Coordinating Ministry for Economic Affairs</i>	64
Kementerian Koordinator Bid Kesejahteraan Rakyat/ <i>Coordinating Ministry for People Welfare</i>	41
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata/ <i>Ministry of Culture and Tourism</i>	510
Kementerian Negara BUMN/ <i>Ministry of State for Agency of State Enterprises</i>	56

Catatan Note : 1) Angka sebelum perubahan / *Figure before change*
 2) Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena pembulatan/
Difference of one digit on the last figures are caused by rounded off
 3) Termasuk Departemen Perdagangan / *Including Departement of Trade*
 4) Termasuk/*Including* LIPI, BATAN, BPPT, LAPAN, BAKOSURTANAL, BSN, dan/and BAPETEN
 5) Termasuk / *Including* LAN, ANRI, BKN, dan / and BPKP

Sumber/Source: Departemen Keuangan / *Ministry of Finance*

Tabel
Tabel : 12

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi 1)
The Budget Central Government Expenditures by Organization
2005 2)
(Milyar Rupiah/Billion Rupiahs)

Lanjutan / Continues

Organisasi / Organization	2005
(1)	(2)
Kementerian Negara Riset dan Teknologi/ <i>Ministry of State for Research and Technology</i>	1 397 4)
Kementerian Negara Lingkungan Hidup/ <i>Ministry of State for Environment</i>	218
Kementerian Negara Koperasi dan UKM/ <i>Ministry of Cooperative, Small and Medium Enterprises</i>	1 065
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan/ <i>Ministry for Making Efficient Use (Empowerment) of Women</i>	85
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/ <i>Ministry of State for Making Efficient Use of The State Apparatus</i>	822 5)
Badan Intelijen Negara/ <i>National Intelligence Agency</i>	677
Lembaga Sandi Negara/ <i>State Secreets Institute</i>	365
Dewan Ketahanan Nasional/ <i>National Defence Council</i>	21
Badan Pusat Statistik/ <i>Central Agency of Statistic</i>	347
Kementerian Negara PPN/Bappenas/ <i>Ministry of State for The National Development Planning</i>	180
Badan Pertahanan Nasional/ <i>Agency for National Land Affairs</i>	1 007
Perpustakaan Nasional/ <i>National Library</i>	100
Departemen Komunikasi dan informasi/ <i>Ministry of State for Communication and Information</i>	279
Kepolisian Negara Republik Indonesia/ <i>State Police</i>	11 166
Badan Pengawas Obat dan Makanan/ <i>Agency for Control of Medicine and Food</i>	207
Lembaga Ketahanan Nasional/ <i>National Endurance Institution</i>	41
Badan Koordinasi Penanaman Modal/ <i>Financial Capital Investment Coordinating Board</i>	221
Badan Narkotika Nasional/ <i>National Narcotic Board</i>	194
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal/ <i>Ministry of The Acceleration of Development of Left Behind Regional</i>	77
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional/ <i>Agency for National Family Planning Coordinating</i>	596
Komisi Nasional Hak Azasi Manusia/ <i>Human Rights Commision</i>	15
Badan Meteorologi dan Geofisika/ <i>Bureau of Meteorology and Geophysics</i>	180
Komisi Pemilihan Umum/ <i>National Election Commision</i>	12
Mahkamah Konstitusi/ <i>Constitution Court</i>	155
Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan/ <i>Central of Analysis Report of Financial Transaction</i>	-
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/ <i>Indonesian Institute of Sciences</i>	-
Badan Tenaga Nuklir Nasional/ <i>Agency for National Nuclear Energy</i>	-

Catatan Note : 1) Angka sebelum perubahan / *Figure before change*
2) Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena pembulatan/
Difference of one digit on the last figures are caused by rounded off
3) Termasuk Departemen Perdagangan / *Including Departement of Trade*
4) Termasuk/*Including* LIPI, BATAN, BPPT, LAPAN, BAKOSURTANAL, BSN, dan/and BAPETEN
5) Termasuk / *Including* LAN, ANRI, BKN, dan / *and* BPKP

Sumber/*Source*: Departemen Keuangan / *Ministry of Finance*

Tabel
Tabel : 12

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi 1)
The Budget Central Government Expenditures by Organization
2005 2)
(Milyar Rupiah/Billion Rupiahs)

Lanjutan / Continues

Organisasi / Organization	2005
(1)	(2)
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/Agency for The Assesment and Application of Technology	-
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional/The Institute of National Space and Aviation	-
Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional/Agency for Coordination of Survey and National Mapping	-
Badan Standardisasi Nasional/Agency for National Standarization	-
Badan Pengawas Tenaga Nuklir/Agency for Nuclear Energy Control	-
Lembaga Administrasi Negara/National Institute of Public Administration	-
Arsip Nasional Republik Indonesia/National Archives	-
Badan Kepegawaian Negara/The National Civil Services Agency	-
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Finance Supervision and Development Board	-
Departemen Perdagangan/Departement of Trade	-
Kementerian Negara Perumahan Rakyat/State Ministry of People Housing	-
Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga/State Ministry for Youth and Sports	-
Komisi Pemberantasan Korupsi/Corruption Eradication Commission	-
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD/Rehabilitation and Reconstruction Board for NAD	-
Dewan Perwakilan Daerah/Board of The Region Representative	-
Komisi Yudisial RI/Yudicial Commission	-
JUMLAH / TOTAL	127 422
BAGIAN ANGGARAN PEMBAYARAN DAN PERHITUNGAN/FINANCING AND CALCULATING	
Cicilan dan Bunga Utang/Debt Service and Interest Payment	64 666
Subsidi dan Transfer Lainnya/Subsidies and Other Transfer	58 358
Belanja Lain-lain/Other Expenditure	15 774
JUMLAH / TOTAL	138 798
JUMLAH BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI / TOTAL CENTRAL GOVERNMENT EXPENDITURES BY ORGANIZATION	266 220

- Catatan Note : 1) Angka sebelum perubahan / Figure before change
 2) Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena pembulatan/
 Difference of one digit on the last figures are caused by rounded off
 3) Termasuk Departemen Perdagangan / Including Departement of Trade
 4) Termasuk/Including LIPI, BATAN, BPPT, LAPAN, BAKOSURTANAL, BSN, dan/and BAPETEN
 5) Termasuk / Including LAN, ANRI, BKN, dan / and BPKP

Sumber/Source: Departemen Keuangan / Ministry of Finance

Tabel : 13
Table

Pembiayaan Anggaran 1)
Budget Financing
2004 – 2005 2)
(Milyar Rupiah/Billion Rupiahs)

Uraian / <i>Description</i>	2004	2005
(1)	(3)	(4)
A. Pembiayaan Dalam Negeri / <i>Domestic Financing</i>	40 557	37 586
I. Perbankan Dalam Negeri / <i>Domestic Bank Financing</i>	19 199	9 000
II. Non Perbankan Dalam Negeri / <i>Non Bank Financing</i>	21 358	28 586
1. Privatisasi / <i>Privatisation Proceeds</i>	5 000	3 500
2. Penjualan Aset Program Restrukturisasi Perbankan / <i>Asset Recovery</i>	5 000	4 000
3. Surat Utang Negara / <i>Government Bonds (Net)</i>	11 358	22 086
4. Penyertaan Modal Negara / <i>Government Capital Participation</i>	-	- 1 000
B. Pembiayaan Luar Negeri (Bersih)/<i>Foreign Financing, Net</i>	- 16 139	- 20 194
I. Penarikan Pinjaman Luar Negeri / <i>Gross Drawing</i>	28 237	26 643
1. Pinjaman Program / <i>Program Loan</i>	8 500	8 600
2. Pinjaman Proyek / <i>Project Loan</i>	19 737	18 043
II. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN / <i>Amortization</i>	- 44 376	- 46 837
Jumlah / <i>Total</i>	24 418	17 392

Sumber/*Source* : Departemen Keuangan / *Ministry of Finance*

Catatan/*Note* : 1) Angka sebelum perubahan / *Figure before change*

2) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan/
Difference of one digit on the last figures are caused by rounded off

TABEL : 14
TABLE

ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TERMASUK BANTUAN PROYEK
THE BUDGETED DEVELOPMENT EXPENDITURE INCLUDING PROJECT AID
2000 – 2005 3)
(Milyar Rupiah / Billions of Rupiah)

SEKTOR / SECTOR	Tahun Anggaran / Fiscal Year		
	2000 1)	2001	2002
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Industri / <i>Industry</i>	142,7	1.532,8	1.813
2. Pertanian, Kehutanan, Kelautan & Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, Oceanic & Fishery</i>	2.753,2	3.113,7	3.709
3. Pengairan / <i>Irrigation</i>	2.219,0	3.122,8	3.712
4. Tenaga Kerja / <i>Manpower</i>	410,0	185,2	167
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi / <i>Trade, Unfolding National Initiative, Financial dan Cooperative</i>	869,9	4.799,1	921
6. Transportasi, Meteorologi dan Geofisika / <i>Transportation, Meteorology, and Geophysics</i>	3.219,7	4.787,2	7.810
7. Pertambangan dan Energi / <i>Mining and Energy</i>	1.783,8	2.467,2	3.778
8. Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika/ <i>Tourism, Post, Telecommunication & Informatic</i>	724,8	1.146,9	1.686
9. Pembangunan Daerah dan Transmigrasi / <i>Local Government Development and Transmigration</i>	16.907,2	3.213,2	3.649
10. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang / <i>Natural Resources, Enviroment and Lay-out</i>	551,3	696,4	653
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olahraga <i>Education, Culture, Youth, and Sports</i>	5.396,8	9.700,7	11.307
12. Kependudukan dan Keluarga / <i>Demography and Family</i>	350,6	228,7	326
13. Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, dan Pemberdayaan Perempuan / <i>Social Welfare, Healthy, & Women Participation</i>	2.308,6	3.771,0	4.908
14. Perumahan dan Pemukiman / <i>Dwelling and Residence</i>	718,6	753,6	1.136
15. Agama / <i>Religious</i>	36,5	64,5	86
16. Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi / <i>Science and Technology</i>	648,3	651,5	713
17. Hukum / <i>Law</i>	131,0	311,7	546
18. Aparatur Negara dan Pengawasan / <i>Civil Servants and Control</i>	502,6	847,1	1.307
19. Politik, Hubungan Luar Negeri, Informasi dan Komunikasi <i>Politics, International Relation, Information and Communication</i>	44,3	225,9	155
20. Pertahanan dan Keamanan / <i>Defence and Security</i>	1.886,8	2.368,2	3.917
J U M L A H / T O T A L	41.606	43.987	52.299

Sumber / *Source* : Departemen Keuangan / *Ministry of Finance*

Catatan / *Note* : 1) April - Desember

Belum dikurangi dengan anggaran belanja pembangunan untuk daerah /
This amount is not yet reduced by regional development budget

TABEL : 14
TABLE

ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TERMASUK BANTUAN PROYEK
THE BUDGETED DEVELOPMENT EXPENDITURE INCLUDING PROJECT AID
1999/2000 – 2004 3)
(Milyar Rupiah / Billions of Rupiah)

Lanjutan / Continues

SEKTOR / SECTOR	Tahun Anggaran / Fiscal Year		
	2003	2004	2005 2)
(1)	(5)	(6)	(7)
1. Industri / <i>Industry</i>	1.068	1.063	-
2. Pertanian, Kehutanan, Kelautan & Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, Oceanic & Fishery</i>	4.731	4.919	-
3. Pengairan / <i>Irrigation</i>	4.764	4.798	-
4. Tenaga Kerja / <i>Manpower</i>	348	300	-
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi / <i>Trade, Unfolding National Initiative, Financial dan Cooperative</i>	1.597	1.548	-
6. Transportasi, Meteorologi dan Geofisika / <i>Transportation, Meteorology, and Geophysics</i>	9.052	9.923	-
7. Pertambangan dan Energi / <i>Mining and Energy</i>	3.183	2.852	-
8. Pariwisata, Pos, Telekomunikasi & Informatika/ <i>Tourism, Post, Telecommunication & Informatic</i>	438	382	-
9. Pembangunan Daerah dan Transmigrasi / <i>Local Government Development and Transmigration</i>	2.979	3.228	-
10. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang / <i>Natural Resources, Enviroment and Lay-out</i>	511	778	-
11. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olahraga <i>Education, Culture, Youth, and Sports</i>	15.058	15.339	-
12. Kependudukan dan Keluarga / <i>Demography and Family</i>	451	517	-
13. Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, dan Pemberdayaan Perempuan / <i>Social Welfare, Healthy, & Women Participation</i>	6.594	7.290	-
14. Perumahan dan Pemukiman / <i>Dwelling and Residence</i>	1.853	1.631	-
15. Agama / <i>Religious</i>	134	166	-
16. Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi / <i>Science and Technology</i>	1.112	983	-
17. Hukum / <i>Law</i>	1.020	1.093	-
18. Aparatur Negara dan Pengawasan / <i>Civil Servants and Control</i>	2.719	3.028	-
19. Politik, Hubungan Luar Negeri, Informasi dan Komunikasi <i>Politics, International Relation, Information and Communication</i>	327	311	-
20. Pertahanan dan Keamanan / <i>Defence and Security</i>	7.191	10.722	-
J U M L A H / T O T A L	65.130	70.871	-

Sumber / Source : Departemen Keuangan / Ministry of Finance

Catatan/Note : 2) Mulai tahun 2005 diterapkan anggaran belanja terpadu, yaitu menyatukan anggaran belanja rutin dengan belanja pembangunan/*Since 2005 is using unified budget, that included of the budgeted current expenditures and the budgeted development expenditures*

3) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatan/*Difference of one digit on the last figures are caused by rounded off*

TABEL : 15
TABLE

RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI
THE BUDGET AND REALIZATION
2002 – 2004
(Milyar Rupiah / Billions of Rupiah)

PERINCIAN / <i>DESCRIPTION</i>	Tahun Anggaran / <i>Fiscal Year</i>		
	2002 1)	2003 1)	2004 2)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. ANGGARAN / <i>BUDGET</i>			
A. <i>Penerimaan / Revenues</i>	301,9	336,2	349,9
1. <i>Penerimaan Dalam Negeri / Domestic Revenue</i>	301,9	336,2	349,3
2. <i>Hibah / Grants</i>	-	-	0,6
B. <i>Pengeluaran / Expenditures</i>	344,0	370,6	374,3
1. <i>Pengeluaran Pemerintah Pusat / Central Government Expenditures</i>	246,0	253,7	255,3
2. <i>Pengeluaran Untuk Daerah / Regional Expenditures</i>	98,0	116,9	119,0
C. <i>Surplus (+) / Defisit (-)</i>	-42,1	-34,4	-24,4
II. REALISASI / <i>REALIZATION</i>			
A. <i>Penerimaan / Revenues</i>	298,6	341,4	407,8
1. <i>Penerimaan Dalam Negeri / Domestic Revenues</i>	298,5	340,9	407,5
2. <i>Hibah / Grants</i>	0,1	0,5	0,3
B. <i>Pengeluaran / Expenditures</i>	322,2	376,5	435,7
1. <i>Pengeluaran Pemerintah Pusat / Central Government Expenditures</i>	224,0	256,2	306,1
2. <i>Pengeluaran Untuk Daerah / Regional Expenditures</i>	98,2	120,3	129,6
C. <i>Surplus (+) / Defisit (-)</i>	-23,6	-35,1	-27,9
III. SELISIH ANGGARAN DENGAN REALISASI / <i>DIFFERENCE OF BUDGETED AND REALIZATION (I - II)</i>			
A. <i>Penerimaan / Receipts</i>	3,3	-5,2	-57,9
B. <i>Pengeluaran / Expenditures</i>	21,8	-5,9	-61,4

Sumber / *Source* : Departement Keuangan / *Ministry of Finance*

Catatan / *Note* : 1) Realisasi PAN (Perhitungan Anggaran Negara) / *PAN Figure*

2) Realisasi Januari – Desember / *Actual January – December*

TABEL : 16
TABLE

POSISI PORTOFOLIO OBLIGASI PEMERINTAH
OUTSTANDING OF GOVERNMENT BONDS PORTFOLIO
1999 – 2004
(Milyar Rupiah / Billions of Rupiah)

PERINCIAN / <i>DESCRIPTION</i>	Akhir Periode / <i>End of Period</i>		
	1999	2000	2001
(1)	(2)	(3)	(4)
A. MENURUT JENIS / <i>BY TYPE</i>			
1. Suku Bunga Tetap / <i>Fixed Rate</i>	51.292	179.442	175.464
2. Suku Bunga Variabel / <i>Variable Rate</i>	203.898	219.479	219.479
3. Lindung Nilai / <i>Hedge Bonds</i>	26.640	32.880	40.359
B. MENURUT PORTOFOLIO / <i>BY PORTFOLIO</i>			
1. Investasi / <i>Investment Purpose</i>	281.831	400.167	370.648
2. Perdagangan / <i>Trading Purpose</i>	-	31.635	64.654
C. MENURUT KEPEMILIKAN / <i>BY OWNERSHIP</i>			
1. Bank Rekapitalisasi / <i>Recapitalized Banks</i>	281.830	423.023	396.630
a. Bank Pesero / <i>State Banks</i>	178.000	283.064	263.900
b. BUSN / <i>Private National Banks</i>	22.125	17.873	28.349
c. BTO / <i>Taken Over Banks</i>	80.475	120.856	103.151
d. BPD / <i>Regional Government Banks</i>	1.230	1.230	1.230
2. Bank Non Rekapitalisasi / <i>Non Recapitalized Banks</i>	-	6.954	24.772
3. Departemen Keuangan / <i>Ministry of Finance</i>	-	-	877
4. Sub Registrasi / <i>Sub Registry</i>	-	1.823	13.022
D. JUMLAH / <i>TOTAL</i>	281.830	431.800	435.301

Sumber / Source : Bank Indonesia / *Bank Indonesia*

TABEL : 16

POSISI PORTOFOLIO OBLIGASI PEMERINTAH

TABLE

OUTSTANDING OF GOVERNMENT BONDS PORTFOLIO
1999 – 2004
(Milyar Rupiah / Billions of Rupiah)

Lanjutan / Continues

PERINCIAN / <i>DESCRIPTION</i>	Akhir Periode / <i>End of Period</i>		
	2002	2003	2004
(1)	(5)	(6)	(7)
A. MENURUT JENIS / <i>BY TYPE</i>			
1. Suku Bunga Tetap / <i>Fixed Rate</i>	154.456	159.039	178.733
2. Suku Bunga Variabel / <i>Variable Rate</i>	239.602	231.443	220.571
3. Lindung Nilai / <i>Hedge Bonds</i>	25.299	12.959	2.795
B. MENURUT PORTOFOLIO / <i>BY PORTFOLIO</i>			
1. Investasi / <i>Investment Purpose</i>	319.643	212.973	180.520
2. Perdagangan / <i>Trading Purpose</i>	99.713	190.468	221.579
C. MENURUT KEPEMILIKAN / <i>BY OWNERSHIP</i>			
1. Bank Rekapitalisasi / <i>Recapitalized Banks</i>	359.870	307.044	257.294
a. Bank Pesero / <i>State Banks</i>	246.349	204.174	161.639
b. BUSN / <i>Private National Banks</i>	29.771	22.966	18.746
c. BTO / <i>Taken Over Banks</i>	82.538	78.006	76.296
d. BPD / <i>Regional Government Banks</i>	1.212	1.898	613
2. Bank Non Rekapitalisasi / <i>Non Recapitalized Banks</i>	13.829	27.451	33.066
3. Departemen Keuangan / <i>Ministry of Finance</i>	872	-	-
4. Sub Registrasi / <i>Sub Registry</i>	44.782	68.947	111.740
D. JUMLAH / <i>TOTAL</i>	419.353	403.442	402.100

Sumber / Source : Bank Indonesia / *Bank Indonesia*

TABEL : 17

UANG BEREDAR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

TABLE

MONEY SUPPLY AND ITS DETERMINANTS
1999 – 2004
(Milyar Rupiah / Billions of Rupiah)

PERINCIAN / DESCRIPTION	1999	2000	2001
(1)	(2)	(3)	(4)
A. UANG BEREDAR / MONEY SUPPLY			
1. Uang Kartal / <i>Currency</i>	58.353	72.371	76.342
2. Uang Giral / <i>Demand Deposits</i>	66.280	89.815	101.389
3. Jumlah (1 + 2) / <i>Total (1 + 2)</i>	124.633	162.186	177.731
4. Uang Kuasi / <i>Quasy Money</i>	521.572	584.842	666.322
5. Jumlah (3 + 4) / <i>Total (3 + 4)</i>	646.205	747.028	844.053
B. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UANG BEREDAR / ITS DETERMINANTS			
1. Aktiva Luar Negri / <i>Net Foreign Asset</i>	129.096	210.733	233.975
2. Tagihan Bersih pada Pemerintah Pusat / <i>Net Claims on Central Government</i>	397.257	520.317	529.706
3. Tagihan kepada Lembaga dan BUMN / <i>Claims on Official Entities and State Enterprises</i>	18.862	14.357	18.337
4. Tagihan kepada Perusahaan Swasta dan Perorangan / <i>Claims on Private Enterprises and Individual</i>	233.714	280.566	310.816
5. Lainnya Bersih / <i>Net Others 1)</i>	-132.724	-274.162	-248.781

Sumber / *Source* : Bank Indonesia / *Bank Indonesia*

Catatan / *Note* : 1) Termasuk Jaminan Impor / *Include Import Guarantee Deposits*

TABEL : 17

UANG BEREDAR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

TABLE

MONEY SUPPLY AND ITS DETERMINANTS
1998 – 2003
(Milyar Rupiah / Billions of Rupiah)

Lanjutan / Continues

PERINCIAN / DESCRIPTION	2002	2003	2004
(1)	(5)	(6)	(7)
A. UANG BEREDAR / MONEY SUPPLY			
1. Uang Kartal / <i>Currency</i>	80.686	94.542	109.265
2. Uang Giral / <i>Demand Deposits</i>	111.253	129.257	144.553
3. Jumlah (1 + 2) / <i>Total (1 + 2)</i>	191.939	223.799	253.818
4. Uang Kuasi / <i>Quasy Money</i>	691.969	731.893	731.893
5. Jumlah (3 + 4) / <i>Total (3 + 4)</i>	883.908	955.692	779.709
B. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UANG BEREDAR / ITS DETERMINANTS			
1. Aktiva Luar Negri / <i>Net Foreign Asset</i>	250.696	271.820	263.647
2. Tagihan Bersih pada Pemerintah Pusat / <i>Net Claims on Central Government</i>	510.351	479.013	498.019
3. Tagihan kepada Lembaga dan BUMN / <i>Claims on Official Entities and State Enterprises</i>	22.889	24.087	26.919
4. Tagihan kepada Perusahaan Swasta dan Perorangan / <i>Claims on Private Enterprises and Individual</i>	366.407	442.741	588.885
5. Lainnya Bersih / <i>Net Others 1)</i>	-266.435	-261.969	-343.943

Sumber / Source : Bank Indonesia / *Bank Indonesia*Catatan / Note : 1) Termasuk Jaminan Impor / *Include Import Guarantee Deposits*

TABEL : 18
TABLE

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH PROPINSI
ACTUAL RECEIPTS AND EXPENDITURES FOR PROVINCE REGIONS
2002 - 2004
(Jutaan Rupiah / Millions of Rupiah)

PROPINSI PROVINCE	Tahun Year	Penerimaan/Revenues		Pengeluaran/Expenditures	
		Pendapatan	Pembiayaan	Belanja	Pembiayaan
		Revenues	Financing	Expenditures	Financing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Nanggroe Aceh Darussalam	2002	1.516.565	20.961	1.370.938	166.588
	2003	1.908.045	156.707	2.064.752	0
	2004	2.257.969	648.774	1.963.266	943.477
2. Sumatera Utara	2002	1.029.325	150.588	976.411	203.502
	2003	1.413.344	158.629	1.323.052	248.921
	2004	1.664.099	218.599	1.501.539	381.159
3. Sumatera Barat	2002	483.022	78.787	452.273	109.536
	2003	576.924	109.285	569.872	116.337
	2004	683.908	140.544	656.343	168.109
4. Riau	2002	1.673.955	455.676	1.714.855	414.776
	2003	1.996.470	414.776	1.913.837	497.409
	2004	2.119.999	497.409	1.972.354	645.054
5. Jambi	2002	382.595	66.709	363.492	85.812
	2003	521.174	95.020	489.372	126.822
	2004	649.936	126.784	660.930	115.790
6. Sumatera Selatan	2002	728.019	78.153	692.001	114.171
	2003	928.024	113.979	852.325	189.678
	2004	1.088.213	190.919	1.141.095	138.037
7. Bengkulu	2002	219.065	17.872	192.617	44.320
	2003	306.565	43.827	308.233	42.159
	2004	352.557	41.736	339.862	54.431
8. Lampung	2002	565.195	95.873	539.118	121.950
	2003	700.372	118.395	643.859	174.908
	2004	822.725	174.908	751.109	246.524
9. Bangka Belitung	2002	227.410	45.053	219.790	52.673
	2003	283.907	52.673	249.458	87.122
	2004	327.658	85.822	280.959	132.521
10. DKI Jakarta	2002	8.482.615	2.239.023	8.464.098	2.257.540
	2003	9.982.371	2.165.503	10.382.597	1.765.277
	2004	11.546.326	1.674.007	11.493.273	1.727.060

TABEL : 18
TABLE

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH PROPINSI
ACTUAL RECEIPTS AND EXPENDITURES FOR PROVINCE REGIONS
2002 - 2004
(Jutaan Rupiah / Millions of Rupiah)

Lanjutan / Continues

PROPINSI PROVINCE	Tahun Year	Penerimaan/Revenues		Pengeluaran/Expenditures	
		Pendapatan	Pembiayaan	Belanja	Pembiayaan
		Revenues	Financing	Expenditures	Financing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Jawa Barat	2002	2.541.541	215.799	2.368.013	389.327
	2003	3.264.485	620.936	3.132.781	752.640
	2004	4.044.465	668.422	3.670.567	1.042.320
12. Jawa Tengah	2002	2.154.875	426.092	2.166.006	414.961
	2003	2.352.603	711.638	2.432.717	631.524
	2004	2.883.599	383.353	2.538.437	728.515
13. D I Yogyakarta	2002	449.780	102.126	398.061	153.845
	2003	530.075	153.862	580.053	103.884
	2004	645.618	183.668	639.239	190.047
14. Jawa Timur	2002	2.750.973	783.766	2.810.053	724.686
	2003	3.255.988	720.412	3.469.622	506.778
	2004	3.953.714	502.425	3.516.027	940.112
15. Banten	2002	928.306	108.415	955.003	81.718
	2003	1.118.227	81.730	1.121.715	78.242
	2004	1.345.967	114.541	1.091.721	368.787
16. Bali	2002	676.970	211.571	740.081	148.460
	2003	628.795	148.460	610.785	166.470
	2004	806.559	89.356	664.634	231.281
17. Nusa Tenggara Barat	2002	350.979	46.259	352.586	44.652
	2003	428.070	43.504	429.172	42.402
	2004	472.287	41.360	428.527	85.120
18. Nusa Tenggara Timur	2002	366.033	140.335	318.675	187.693
	2003	414.727	187.693	396.954	205.466
	2004	466.336	195.349	389.542	272.143
19. Kalimantan Barat	2002	436.705	45.346	438.544	43.507
	2003	530.658	39.769	499.589	70.838
	2004	620.105	68.124	596.643	91.586
20. Kalimantan Tengah	2002	334.871	41.042	299.884	76.029
	2003	412.006	75.941	428.226	59.721
	2004	491.797	59.131	475.132	75.796

TABEL : 18
TABLE

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH PROPINSI
ACTUAL RECEIPTS AND EXPENDITURES FOR PROVINCE REGIONS
2002 - 2004
(Jutaan Rupiah / Millions of Rupiah)

Lanjutan / Continues

PROPINSI PROVINCE	Tahun Year	Penerimaan/Revenues		Pengeluaran/Expenditures	
		Pendapatan Revenues	Pembiayaan Financing	Belanja Expenditures	Pembiayaan Financing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21. Kalimantan Selatan	2002	497.601	44.522	493.823	48.300
	2003	562.709	46.145	590.595	18.259
	2004	666.064	12.740	585.331	93.473
22. Kalimantan Timur	2002	1.971.781	450.350	1.397.116	1.025.015
	2003	2.374.410	696.081	2.337.441	733.050
	2004	2.532.796	577.495	2.629.006	481.285
23. Sulawesi Utara	2002	392.596	71.526	393.439	70.683
	2003	391.570	72.649	410.361	53.858
	2004	413.515	22.977	407.433	29.059
24. Sulawesi Tengah	2002	288.983	5.534	265.534	28.983
	2003	373.688	27.039	365.769	34.958
	2004	413.605	51.966	417.137	48.434
25. Sulawesi Selatan	2002	658.835	112.434	672.412	98.857
	2003	863.804	98.857	821.190	141.471
	2004	1.025.052	129.921	938.635	216.338
26. Sulawesi Tenggara	2002	239.997	36.739	257.159	19.577
	2003	338.237	33.264	351.556	19.945
	2004	361.355	19.949	361.332	19.972
27. Gorontalo	2002	147.293	3.319	150.612	0
	2003	227.461	0	207.544	19.917
	2004	256.131	19.735	241.154	34.712
28. Maluku	2002	234.426	82.051	239.294	77.183
	2003	336.283	77.183	375.322	38.144
	2004	403.367	39.108	393.177	49.298
29. Maluku Utara	2002	189.506	19.901	181.903	27.504
	2003	249.170	27.504	269.800	6.874
	2004 1	285.016	6.874	291.890	0
30. Papua	2002	2.019.871	124.631	2.144.502	0
	2003	2.276.300	23.106	2.299.406	0
	2004	2.439.386	121.381	2.363.886	196.881
INDONESIA	2002	32.939.688	6.320.453	32.028.293	7.231.848
	2003	39.546.460	7.314.567	39.927.956	6.933.071
	2004	46.040.124	7.107.377	43.400.180	9.747.321

Sumber / Source : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi

Catatan / Note : 1) Anggaran (APBD) / Budget

TABEL : 19 REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TABLE ACTUAL RECEIPTS AND EXPENDITURES FOR REGENCY/MUNICIPALITY REGIONS
 2003 - 2004
 (Jutaan Rupiah / Millions of Rupiah)

PROPINSI PROVINCE	Tahun Year	Penerimaan/Revenues		Pengeluaran/Expenditures	
		Pendapatan Revenues	Pembiayaan Financing	Belanja Expenditures	Pembiayaan Financing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Nanggroe Aceh Darussalam	2003	4.427.624	535.908	4.098.037	865.495
	2004 I	4.983.233	571.395	5.544.094	10.535
2. Sumatera Utara	2003	6.059.005	511.107	6.270.393	299.718
	2004 I	6.162.431	320.217	6.262.627	220.020
3. Sumatera Barat	2003	3.141.901	393.642	3.080.260	455.283
	2004 I	3.269.061	372.654	3.609.770	31.946
4. R i a u	2003	5.364.827	1.342.618	5.795.743	911.702
	2004 I	5.342.577	990.571	6.067.854	265.294
5. Ja m b i	2003	1.990.562	221.127	2.034.268	177.422
	2004 I	2.088.599	252.089	2.292.424	48.264
6. Sumatera Selatan	2003	3.302.678	333.702	3.427.921	208.459
	2004 I	3.712.350	201.053	3.878.739	34.664
7. Bengkulu	2003	957.179	71.381	967.574	60.985
	2004 I	788.931	53.866	842.574	223
8. Lampung	2003	2.900.801	229.547	2.977.021	153.327
	2004 I	2.980.475	159.701	3.130.354	9.823
9. Bangka Belitung	2003	638.879	90.931	593.060	136.750
	2004 I	589.017	86.366	672.421	2.962
10. Kepulauan Riau	2003	1.481.856	339.565	1.592.945	228.476
	2004 I	1.254.198	285.180	1.513.723	25.654
11. Jawa Barat	2003	11.941.346	1.008.339	11.771.297	1.178.387
	2004 I	12.229.932	553.686	12.599.644	183.973
12. Jawa Tengah	2003	12.516.540	1.610.229	12.918.620	1.208.150
	2004 I	12.616.955	1.173.972	13.490.595	300.332
13. D I Yogyakarta	2003	1.790.543	199.043	1.729.591	259.995
	2004 I	1.814.179	212.072	2.020.121	6.130

TABEL : 19 REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TABLE ACTUAL RECEIPTS AND EXPENDITURES FOR REGENCY/MUNICIPALITY REGIONS
2003 - 2004
(Jutaan Rupiah / Millions of Rupiah)

Lanjutan / Continues

PROPINSI PROVINCE	Tahun Year	Penerimaan/Revenues		Pengeluaran/Expenditures	
		Pendapatan Revenues	Pembiayaan Financing	Belanja Expenditures	Pembiayaan Financing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. Jawa Timur	2003	14.044.393	1.816.710	14.376.857	1.484.246
	2004 1	14.094.427	1.607.018	15.217.516	483.929
15. Banten	2003	2.742.952	290.577	2.774.134	259.396
	2004 1	2.861.013	214.112	3.004.634	70.491
16. Bali	2003	2.492.369	401.336	2.543.593	350.112
	2004 1	2.608.617	287.022	2.840.578	55.060
17. Nusa Tenggara Barat	2003	1.975.655	156.334	2.026.904	105.085
	2004 1	2.117.618	106.963	2.205.096	19.486
18. Nusa Tenggara Timur	2003	2.908.948	304.085	2.827.874	385.158
	2004 1	2.920.312	228.894	3.056.441	92.764
19. Kalimantan Barat	2003	2.534.253	162.999	2.557.061	140.192
	2004 1	2.578.993	147.395	2.662.248	64.139
20. Kalimantan Tengah	2003	2.079.172	265.713	1.992.608	352.278
	2004 1	2.324.512	275.111	2.566.982	32.641
21. Kalimantan Selatan	2003	2.243.725	167.621	2.210.991	200.354
	2004 1	2.227.841	246.490	2.382.166	92.165
22. Kalimantan Timur	2003	7.441.654	1.307.549	7.562.530	1.186.672
	2004 1	7.468.484	1.224.188	8.258.668	434.005
23. Sulawesi Utara	2003	1.273.727	36.681	1.235.724	74.684
	2004 1	1.220.381	83.095	1.272.152	31.323
24. Sulawesi Tengah	2003	1.740.742	92.555	1.734.576	98.721
	2004 1	1.837.708	68.375	1.902.575	3.508
25. Sulawesi Selatan	2003	5.120.342	379.052	5.111.488	387.905
	2004 1	5.359.566	339.184	5.659.981	38.770
26. Sulawesi Tenggara	2003	1.367.010	120.599	1.389.922	97.688
	2004 1	1.469.457	91.983	1.511.894	49.545

TABEL : 19 REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TABLE ACTUAL RECEIPTS AND EXPENDITURES FOR REGENCY/MUNICIPALITY REGIONS
2003 - 2004
(Jutaan Rupiah / Millions of Rupiah)

Lanjutan / Continues

PROPINSI PROVINCE	Tahun Year	Penerimaan/Revenues		Pengeluaran/Expenditures	
		Pendapatan Revenues	Pembiayaan Financing	Belanja Expenditures	Pembiayaan Financing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. Gorontalo	2003	601.522	59.268	619.131	41.659
	2004 1	594.174	61.306	654.745	736
28. Maluku	2003	1.190.366	110.330	1.180.296	120.400
	2004 1	1.244.427	131.841	1.336.686	39.581
29. Maluku Utara	2003	407.766	22.041	387.964	41.843
	2004 1	436.481	40.185	454.732	21.934
30. Papua	2003	4.622.048	147.739	4.605.916	163.872
	2004 1	3.782.207	167.290	3.887.500	61.996
INDONESIA	2003	111.300.385	12.728.328	112.394.297	11.634.417
	2004 1	112.978.155	10.553.274	120.799.535	2.731.894

Sumber / Source : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Catatan / Note : 1) Anggaran (APBD) / Budget

TABEL : 20
TABLE

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DESA URBAN
ACTUAL RECEIPTS AND EXPENDITURES OF URBAN VILLAGE GOVERNMENT
2001 - 2003
(Ribuan Rupiah / Thousands of Rupiah)

PROPINSI PROVINCE	Tahun Year	Penerimaan Receipt	Pengeluaran / Expenditures		
			Rutin Routine	Pembangunan Development	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Nanggroe Aceh Darussalam	2001	14.651.047	4.769.943	9.674.141	14.444.084
	2002	16.062.375	7.865.385	8.162.930	16.028.315
	2003	18.504.542	9.895.428	8.535.451	18.430.879
2. Sumatera Utara	2001	24.356.694	10.999.501	13.326.275	24.325.776
	2002	33.341.696	17.826.468	11.811.345	29.637.813
	2003	28.113.398	17.759.316	10.326.051	28.085.368
3. Sumatera Barat	2001	8.603.494	3.658.739	4.283.546	7.942.285
	2002	19.876.661	10.442.413	9.420.413	19.862.826
	2003	22.335.001	13.208.783	8.497.395	21.706.178
4. R i a u	2001	6.841.418	3.904.557	2.936.861	6.841.418
	2002	6.964.133	3.039.968	3.524.097	6.564.066
	2003	5.804.075	3.634.729	2.162.346	5.797.075
5. Ja m b i	2001	2.332.742	1.100.250	1.232.492	2.332.742
	2002	2.461.708	1.052.012	1.216.801	2.268.813
	2003	4.471.710	1.314.055	3.114.709	4.428.764
6. Sumatera Selatan	2001	4.872.209	2.768.458	2.103.751	4.872.209
	2002	5.694.624	3.540.242	2.154.382	5.694.624
	2003	4.433.863	2.656.162	1.729.797	4.385.959
7. Bengkulu	2001	3.629.171	1.558.130	2.071.042	3.629.172
	2002	3.449.849	1.433.413	2.016.435	3.449.848
	2003	2.160.724	1.039.361	1.092.000	2.131.361
8. Lampung	2001	6.742.615	2.975.346	3.749.472	6.724.818
	2002	3.560.377	2.342.640	1.199.945	3.542.585
	2003	7.702.300	4.451.016	3.251.281	7.702.297
9. Bangka Belitung	2001	2.942.934	996.906	1.946.028	2.942.934
	2002	6.326.267	4.338.665	1.773.676	6.112.341
	2003	8.961.458	4.588.606	4.372.695	8.961.302
10. DKI Jakarta	2001	71.151.573	50.159.169	20.938.442	71.097.611
	2002	103.097.927	77.346.734	20.017.248	97.363.982
	2003	112.664.580	96.917.241	14.577.866	111.495.107

TABEL : 20 REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DESA URBAN
TABLE ACTUAL RECEIPTS AND EXPENDITURES OF URBAN VILLAGE GOVERNMENT
2001 - 2003
(Ribuan Rupiah / Thousands of Rupiah)

Lanjutan / Continues

PROPINSI PROVINCE	Tahun Year	Penerimaan Receipt	Pengeluaran / Expenditures		
			Rutin Routine	Pembangunan Development	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Jawa Barat	2001	177.264.984	80.067.242	91.309.649	171.376.891
	2002	170.121.321	90.823.910	75.869.519	166.693.429
	2003	174.509.663	99.330.331	73.122.035	172.452.366
12. Jawa Tengah	2001	165.365.112	91.121.663	72.318.934	163.440.597
	2002	226.741.483	132.412.153	89.228.207	221.640.359
	2003	232.589.023	131.325.207	99.545.246	230.870.453
13. D I Yogyakarta	2001	21.472.107	14.069.848	6.797.752	20.867.600
	2002	28.213.952	15.663.683	10.352.166	26.015.849
	2003	33.665.376	19.814.105	12.491.316	32.305.421
14. Jawa Timur	2001	143.881.676	69.607.126	74.395.619	144.002.745
	2002	189.335.083	102.856.632	85.415.364	188.271.996
	2003	189.845.418	104.112.210	82.957.256	187.069.466
15. Banten	2001	34.880.986	16.492.329	18.384.097	34.876.426
	2002	41.307.556	16.306.294	24.101.103	40.407.397
	2003	37.475.080	22.525.459	14.766.964	37.292.424
16. Bali	2001	19.059.376	13.169.521	5.863.046	19.032.567
	2002	33.056.001	23.161.240	9.191.066	32.352.306
	2003	25.868.473	17.346.556	7.989.785	25.336.341
17. Nusa Tenggara Barat	2001	10.807.833	4.053.078	6.754.755	10.807.833
	2002	11.732.705	3.766.942	7.337.080	11.104.022
	2003	14.965.536	8.167.031	6.069.067	14.236.098
18. Nusa Tenggara Timur	2001	3.414.000	1.221.127	2.192.873	3.414.000
	2002	2.749.405	1.565.183	1.137.349	2.702.532
	2003	3.460.447	2.172.403	1.276.828	3.449.231
19. Kalimantan Barat	2001	2.617.985	1.200.579	1.417.406	2.617.985
	2002	3.758.777	2.335.384	1.334.890	3.670.274
	2003	2.748.782	1.976.252	770.949	2.747.201
20. Kalimantan Tengah	2001	4.957.300	2.219.945	2.737.355	4.957.300
	2002	1.460.557	655.472	742.881	1.398.353
	2003	1.824.180	1.059.454	761.030	1.820.484

TABEL : 20 REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DESA URBAN
TABLE ACTUAL RECEIPTS AND EXPENDITURES OF URBAN VILLAGE GOVERNMENT
2001 - 2003
(Ribuan Rupiah / Thousands of Rupiah)

Lanjutan / Continues

PROPINSI PROVINCE	Tahun Year	Penerimaan Receipt	Pengeluaran / Expenditures		
			Rutin Routine	Pembangunan Development	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21. Kalimantan Selatan	2001	4.266.130	2.366.235	1.914.121	4.280.356
	2002	5.724.525	2.740.899	2.424.524	5.165.423
	2003	6.491.859	3.075.712	2.354.603	5.430.315
22. Kalimantan Timur	2001	6.752.711	4.152.195	2.507.656	6.659.852
	2002	15.967.130	13.294.529	2.605.266	15.899.796
	2003	11.858.346	8.544.002	3.285.344	11.829.346
23. Sulawesi Utara	2001	3.357.393	1.688.309	1.668.130	3.356.439
	2002	4.672.883	1.469.646	2.955.877	4.425.523
	2003	8.310.282	2.348.819	5.958.931	8.307.749
24. Sulawesi Tengah	2001	2.139.472	1.139.434	997.100	2.136.534
	2002	1.873.312	920.828	944.958	1.865.786
	2003	1.510.300	875.796	625.791	1.501.587
25. Sulawesi Selatan	2001	17.247.780	4.956.868	12.290.912	17.247.780
	2002	12.573.999	5.079.686	7.047.118	12.126.804
	2003	10.208.333	6.990.047	3.213.370	10.203.417
26. Sulawesi Tenggara	2001	3.501.751	1.196.815	2.304.936	3.501.751
	2002	3.627.088	1.323.438	2.250.757	3.574.195
	2003	4.028.718	1.911.406	2.117.312	4.028.718
27. Gorontalo	2001	1.740.977	561.123	1.179.854	1.740.977
	2002	2.051.125	688.857	1.353.921	2.042.778
	2003	1.622.460	946.691	668.452	1.615.143
28. Maluku	2001	1.080.589	535.160	544.239	1.079.399
	2002	967.287	478.770	458.690	937.460
	2003	1.053.567	485.910	514.508	1.000.417
29. Maluku Utara	2001	987.116	251.220	735.896	987.116
	2002	1.867.772	1.140.763	720.010	1.860.773
	2003	2.587.946	1.109.334	1.404.837	2.514.171
30. Papua	2001	1.994.719	1.061.672	895.275	1.956.947
	2002	2.181.961	1.251.086	926.368	2.177.454
	2003	3.026.191	1.526.983	1.443.640	2.970.623
INDONESIA	2001	773.183.898	394.022.490	369.471.655	763.494.145
	2002	960.819.539	547.163.335	387.694.387	934.857.722
	2003	982.801.632	591.108.405	378.996.855	970.105.260

Sumber / Source : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Desa

TABEL : 21
TABLE

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DESA RURAL
ACTUAL RECEIPTS AND EXPENDITURES OF RURAL VILLAGE GOVERNMENT
2001 - 2003
(Ribuan Rupiah / Thousands of Rupiah)

PROPINSI PROVINCE	Tahun Year	Penerimaan Receipt	Pengeluaran / Expenditures		
			Rutin Routine	Pembangunan Development	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Nanggroe Aceh Darussalam	2001	103.313.934	33.582.331	68.931.418	102.513.749
	2002	111.824.485	51.173.890	59.814.806	110.988.696
	2003	128.416.231	60.254.525	66.928.146	127.182.671
2. Sumatera Utara	2001	83.709.202	32.094.859	50.588.435	82.683.294
	2002	63.979.885	37.144.544	26.405.444	63.549.988
	2003	91.272.329	42.125.445	48.505.647	90.631.092
3. Sumatera Barat	2001	63.019.587	26.747.263	32.215.868	58.963.131
	2002	253.237.045	100.924.812	139.690.828	240.615.639
	2003	253.053.805	126.933.529	118.261.583	245.195.112
4. Riau	2001	61.520.863	21.885.863	39.635.000	61.520.863
	2002	74.474.516	36.632.148	32.974.373	69.606.521
	2003	77.555.500	48.445.532	28.919.226	77.364.758
5. Jambi	2001	27.574.003	11.444.367	15.817.882	27.262.249
	2002	41.123.797	16.266.324	22.926.218	39.192.542
	2003	48.181.360	21.437.310	25.173.185	46.610.495
6. Sumatera Selatan	2001	53.010.446	22.250.883	30.759.563	53.010.446
	2002	76.024.129	38.828.075	36.944.791	75.772.866
	2003	98.990.441	44.536.110	54.209.922	98.746.032
7. Bengkulu	2001	17.446.928	8.062.669	9.326.741	17.389.410
	2002	26.319.525	10.592.054	15.522.726	26.114.780
	2003	20.553.067	10.375.994	9.728.116	20.104.110
8. Lampung	2001	72.255.600	26.840.304	44.150.676	70.990.980
	2002	61.869.879	28.018.141	33.198.359	61.216.450
	2003	77.726.638	34.097.200	43.300.173	77.397.373
9. Bangka Belitung	2001	7.126.211	3.223.903	3.902.308	7.126.211
	2002	17.663.184	9.554.681	7.547.340	17.102.021
	2003	14.057.328	6.282.974	7.724.371	14.007.345
10. DKI Jakarta	2000	-	-	-	-
	2001	-	-	-	-
	2002	-	-	-	-

TABEL : 21
TABLE

REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DESA RURAL
ACTUAL RECEIPTS AND EXPENDITURES OF RURAL VILLAGE GOVERNMENT
2001 - 2003
(Ribuan Rupiah / Thousands of Rupiah)

Lanjutan / Continues

PROPINSI PROVINCE	Tahun Year	Penerimaan Receipt	Pengeluaran / Expenditures		
			Rutin Routine	Pembangunan Development	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Jawa Barat	2001	313.939.773	147.364.329	161.771.010	309.135.339
	2002	341.568.718	171.858.641	165.640.994	337.499.635
	2003	373.234.685	187.922.187	182.265.143	370.187.330
12. Jawa Tengah	2001	417.233.593	231.871.531	182.281.558	414.153.089
	2002	508.980.555	287.580.088	209.712.807	497.292.895
	2003	588.386.947	340.594.627	245.151.770	585.746.397
13. D I Yogyakarta	2001	23.835.079	11.916.465	10.732.218	22.648.683
	2002	29.714.627	15.173.174	13.399.026	28.572.200
	2003	40.322.688	20.529.696	18.360.535	38.890.231
14. Jawa Timur	2001	373.838.316	188.267.213	185.526.224	373.793.437
	2002	496.672.016	283.554.431	208.957.847	492.512.278
	2003	501.614.891	285.797.622	210.447.211	496.244.833
15. Banten	2001	58.897.047	23.512.598	35.384.448	58.897.046
	2002	63.838.129	25.152.584	38.231.404	63.383.988
	2003	77.444.339	27.476.836	49.681.746	77.158.583
16. Bali	2001	25.732.062	15.854.147	9.777.753	25.631.900
	2002	62.481.446	44.446.582	17.022.023	61.468.605
	2003	49.481.699	31.692.724	16.332.777	48.025.501
17. Nusa Tenggara Barat	2001	34.605.332	11.660.545	22.940.014	34.600.558
	2002	60.004.832	19.594.732	32.067.254	51.661.986
	2003	56.807.601	25.020.587	28.076.515	53.097.101
18. Nusa Tenggara Timur	2001	72.492.770	21.696.720	50.751.643	72.448.363
	2002	81.983.889	44.805.553	35.464.973	80.270.526
	2003	95.244.774	53.261.594	41.138.278	94.399.872
19. Kalimantan Barat	2001	30.639.493	12.502.085	18.131.439	30.633.525
	2002	40.527.522	20.387.039	19.997.321	40.384.360
	2003	40.482.082	23.792.802	16.200.203	39.993.005
20. Kalimantan Tengah	2001	32.027.114	12.859.653	18.978.005	31.837.658
	2002	32.179.151	16.077.468	15.761.614	31.839.083
	2003	37.143.669	16.347.108	20.574.655	36.921.764

TABEL : 21 REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DESA RURAL
TABLE ACTUAL RECEIPTS AND EXPENDITURES OF RURAL VILLAGE GOVERNMENT
2001 - 2003
(Ribuan Rupiah / Thousands of Rupiah)

Lanjutan / Continues

PROPINSI PROVINCE	Tahun Year	Penerimaan Receipt	Pengeluaran / Expenditures		
			Rutin Routine	Pembangunan Development	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21. Kalimantan Selatan	2001	36.876.248	18.361.196	18.370.996	36.732.192
	2002	50.789.565	22.664.169	27.903.845	50.568.014
	2003	55.499.757	22.954.184	32.330.237	55.284.421
22. Kalimantan Timur	2001	49.094.412	23.675.178	24.619.687	48.294.865
	2002	58.997.917	37.635.302	19.909.042	57.544.344
	2003	73.178.260	43.648.697	28.482.585	72.131.282
23. Sulawesi Utara	2001	29.477.774	9.061.806	20.069.025	29.130.831
	2002	41.566.385	16.599.511	19.522.899	36.122.410
	2003	63.336.575	18.761.863	44.415.649	63.177.513
24. Sulawesi Tengah	2001	40.774.049	14.693.824	25.978.888	40.672.712
	2002	43.249.439	17.789.453	24.566.869	42.356.322
	2003	55.117.997	21.453.470	32.179.845	53.633.315
25. Sulawesi Selatan	2001	134.974.525	33.812.950	101.151.013	134.963.964
	2002	141.749.035	49.513.292	89.244.024	138.757.316
	2003	84.036.464	57.888.202	25.781.179	83.669.380
26. Sulawesi Tenggara	2001	48.497.781	16.524.303	31.960.646	48.484.949
	2002	49.937.674	18.240.748	30.367.610	48.608.358
	2003	35.549.726	21.049.170	14.455.266	35.504.436
27. Gorontalo	2001	13.488.842	2.770.086	10.718.742	13.488.828
	2002	11.944.773	4.182.617	7.624.132	11.806.749
	2003	9.934.122	4.105.921	5.725.248	9.831.169
28. Maluku	2001	14.380.198	5.780.232	7.570.283	13.350.515
	2002	18.551.500	5.801.876	11.537.197	17.339.073
	2003	17.322.346	5.954.131	10.503.084	16.457.215
29. Maluku Utara	2001	11.131.758	2.667.025	8.464.733	11.131.758
	2002	10.273.719	3.274.683	6.951.327	10.226.010
	2003	16.556.140	6.114.712	9.727.856	15.842.568
30. Papua	2001	50.060.849	20.639.196	29.364.406	50.003.602
	2002	68.813.015	27.864.340	40.213.036	68.077.376
	2003	92.609.155	43.060.090	48.486.991	91.547.081
INDONESIA	2001	2.300.973.796	1.011.623.526	1.269.870.624	2.281.494.150
	2002	2.940.340.351	1.461.330.953	1.409.120.129	2.870.451.082
	2003	3.173.110.615	1.651.914.841	1.483.067.143	3.134.981.984

Sumber / Source : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Desa

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT 2004

Anggota Tim Penyusun :

Koordinator : DR. Ali Rosidi

Editor : Ir. Zaenal Achmad, M.Si
Eka Sari, SE

Penulis : Agus Nuwibowo, S.Si
Hasan As'ari, SSi

Pengolah Data : Suhartati
Epi Ernaprijatna
Ahmad Saifullah